

**DETERMINAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA
KELURAHAN JOYOTAKAN TAHUN 2021–2025**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si) Program Studi Manajemen
Universitas Islam Batik Surakarta**

Disusun Oleh :

**REZKA TRI NUGRAHA
NIM : 2024P20056**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM BATIK
SURAKARTA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : REZKA TRI NUGRAHA
NPM : 2024P20056
Judul : Determinan Efektivitas Anggaran Belanja Kelurahan Joyotakan
Tahun 2021–2025

TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING		
NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Dr. Kartika Hendra, TS, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSRA (Pembimbing 1)		
2. Dr. Suhendro, SE, M.Si, Ak (Pembimbing 2)		

DISAHKAN PIMPINAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA[		
NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Dr. Suhendro, SE, M.Si, Ak (Dekan Fakultas Ekonomi)		
2. Dr. Hj. Sudarwati, S.E., M.M (Ketua Prodi Manajemen)		
Tanggal Lulus		
Nomor Register		

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Nama : REZKA TRI NUGRAHA
NPM : 2024P20056
Judul : Determinan Efektivitas Anggaran Belanja Kelurahan Joyotakan
Tahun 2021–2025

TELAH DISETUJUI OLEH PENGUJI		
NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Dr. Kartika Hendra, TS, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSRA (Pembimbing 1)		
2. Dr. Suhendro, SE, M.Si, Ak (Pembimbing 2)		
3.		

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezka Tri Nugraha

NIM : 2024P20056

Jurusan/ Program Studi : Megister Manajemen / Manajemen Keuangan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bawa tesis dengan judul :

DETERMINAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA KELURAHAN
JOYOTAKAN TAHUN 2021–2025,

Benar – benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa tesis ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surakarta, September
2026

Yang membuat pernyataan

Rezka Tri Nugraha

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, karya tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu tercinta di surga, atas semua kasih sayang, pengorbanan, serta menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis.
2. Keluarga tercinta, Ambar Setyaningsih, S.Pd, M.Ed (Istri), Letda Pnb. Maheswara Sakha Albarka (anak pertama) dan dr. Kanaziya Aishabarka (anak kedua), yang selalu membuat bersyukur dan dengan penuh pengertian serta dukungan tanpa henti telah mambantu dan menemani penulis selama menempuh pendidikan Magister Manajemen Keuangan di Universitas Islam Batik Surakarta.
3. Dr. Kartika Hendra, TS, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSRA sebagai dosen pembimbing pertama dan Dr. Suhendro, SE, M.Si, Ak sebagai dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan ilmu dan arahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. Ec. Hj. Istiatin, S.E., M.M, Dr. Hj. Sudarwti, S.E., M.M dan seluruh civitas akademika Program Pascasarjana Magister Manajemen UNIBA yang telah memberikan motivasi dan fasilitas untuk menyelesaikan program pendidikan pasca sarjana.
5. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana angkatan 39A yang telah menjadi sahabat seperjuangan, berbagi pengalaman, semangat, dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan, serta menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu.

MOTTO

1. "Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan" (Ali bin Abi Thalib)
2. "Barang siapa memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat" (HR. Muslim No. 2699)
3. "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu" (QS. Ibrahim: 7)
4. "Keberhasilan bukanlah terpenuhinya seluruh keinginan, melainkan kemampuan untuk mensyukuri setiap capaian dan mengabdikan usaha terbaik pada setiap tanggung jawab yang diemban" (Alm Ibunda)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “DETERMINAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA KELURAHAN JOYOTAKAN TAHUN 2021–2025” dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Keuangan di Universitas Islam Batik Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini;
2. Ipmawan Muhammad Iqbal, S.Ag., S.P., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta beserta seluruh jajaran pimpinan universitas;
3. Dr. Suhendro, SE, M.Si, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta sekaligus dosen pembimbing kedua yang telah membimbing selama penyusunan tesis ini;
4. Dr. Hj. Sudarwati, S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada program ini.
5. Dr. Kartika Hendra, TS, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSRA, sebagai dosen pembimbing pertama tesis yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Program Pascasarjana Magister Manajemen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik kepada penulis.
7. Pemerintah Kelurahan Joyotakan beserta seluruh pihak yang telah memberikan izin, bantuan data, dan dukungan selama proses penelitian berlangsung.

8. Keluarga dan seluruh kerabat tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moral maupun material, serta semangat kepada penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana angkatan 39A yang telah menjadi teman seperjuangan selama menempuh pendidikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan sektor publik, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Penganggaran Publik	10
a. Pengertian Penganggaran Publik	10
b. Tujuan Penganggaran Publik.....	10
c. Siklus dan Proses Penganggaran Publik	11
2. Efektivitas Anggaran.....	11
a. Pengertian anggaran.....	11
b. Efektivitas anggaran	12

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas anggaran.....	12
d. Indikator efektivitas anggaran	13
3. Ketepatan Waktu Penyerapan	13
a. Penyerapan anggaran.....	13
b. Ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran	14
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyerapan anggaran	14
d. Dampak ketepatan waktu penyerapan terhadap efektivitas anggaran	15
4. Tingkat Serapan Anggaran.....	16
a. Konsep Serapan Anggaran	16
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat serapan anggaran	16
c. Dampak rendahnya serapan anggaran	17
d. Strategi meningkatkan serapan anggaran	17
5. Deviasi antara target dan realisasi	18
a. Konsep dan definisi deviasi target realisasi.....	18
b. Faktor Penyebab Deviasi	19
6. Proporsi belanja langsung kepada masyarakat.....	20
a. Konsep belanja daerah.....	20
b. Belanja langsung kepada masyarakat	21
c. Teori alokasi dan efektivitas anggaran	21
d. Analisis proporsi belanja langsung.....	21
e. Faktor yang mempengaruhi besaran belanja langsung.....	22
7. Pertumbuhan anggaran belanja	23
a. Landasan teori pertumbuhan anggaran.....	23
b. Definisi pertumbuhan anggaran.....	23
c. Dampak pertumbuhan anggaran	23
d. Analisis Pertumbuhan Anggaran	24
B. Penelitian Yang Relevan.....	25
1. Efektivitas Anggaran.....	25
2. Ketepatan Waktu Penyerapan	26
3. Tingkat Serapan Anggaran.....	27
4. Deviasi Target dan Realisasi	28
5. Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat	30

6. Pertumbuhan anggaran belanja	31
C. Kerangka Konseptual Penelitian	33
D. Pengembangan Hipotesa	33
BAB III	37
A. Metode Penelitian.....	37
1. Desain Penelitian.....	37
2. Tempat dan Waktu	37
3. Populasi dan Sampel	37
4. Teknik Pengumpulan Data	38
B. Variabel Data	38
1. Variabel Dependen (Terikat).....	38
2. Variabel Independen (Bebas)	38
a. Ketepatan Waktu Penyerapan Anggaran	38
b. Tingkat Serapan Anggaran	39
c. Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran.....	39
d. Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat.....	39
e. Pertumbuhan Belanja.....	39
C. Teknik Analisa Data.....	40
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	40
2. Uji Asumsi Klasik	40
a. Uji Normalitas	40
b. Uji Multikolinieritas	41
c. Uji Heterokedastisitas	41
d. Uji Autokorelasi.....	41
3. Uji Regresi Linear Berganda.....	42
a. Model Regresi.....	42
b. Uji Kelayakan Model.....	43
c. Uji Hipotesa	44
d. Uji Koefisien Determinasi/ R^2	45
BAB IV	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
B. Hasil Analisis dan Pembahasan	47

1. Statistik Deskriptif.....	47
2. Uji Asumsi Klasik	49
a. Uji Normalitas	50
b. Uji Multikolinearitas.....	50
c. Uji Heteroskedastisitas	51
d. Uji Autokorelasi.....	53
3. Uji Regresi Linear Berganda.....	54
a. Model Regresi.....	54
b. Uji Kelayakan Model (Uji F).....	57
c. Uji Hipotesis	58
d. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	60
C. Pembahasan.....	61
1. Pengaruh ketepatan waktu penyerapan anggaran terhadap Efektivitas Anggaran	61
2. Pengaruh tingkat serapan anggaran terhadap efektivitas anggaran.....	63
3. Pengaruh deviasi realisasi terhadap target anggaran terhadap efektivitas anggaran	63
4. Pengaruh proporsi belanja langsung kepada masyarakat terhadap efektivitas anggaran	64
5. Pengaruh pertumbuhan belanja terhadap efektivitas anggaran	64
D. Keterbatasan Penelitian.....	65
BAB V	67
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi.....	67
1. Implikasi Teoritis	67
2. Implikasi Praktis.....	67
C. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rata-Rata Kinerja Variabel Penelitian per Tahun Anggaran	47
Tabel 4.2. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	48
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas.....	50
Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinearitas	51
Tabel 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)	52
Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda – Coefficients	54
Tabel 4.8. Hasil Uji Kelayakan Model (ANOVA).....	57
Tabel 4.9. Hasil Uji Hipotesis	58
Tabel 4.10. Hasil Uji Koefisien Determinasi	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian.....	33
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Populasi Variabel pada Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan

Lampiran 2. Hasil Analisis Deskriptif

Lampiran 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta periode 2021–2025. Efektivitas anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah karena mencerminkan kemampuan realisasi belanja dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas anggaran pada tingkat pemerintahan kelurahan.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data realisasi anggaran triwulanan yang diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kelurahan Joyotakan. Variabel yang diteliti meliputi **Ketepatan waktu penyerapan anggaran, Tingkat Serapan Anggaran, Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran, Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat, dan Pertumbuhan Belanja** sebagai variabel independen, serta efektivitas anggaran belanja sebagai variabel dependen. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan didahului pengujian asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja. Secara parsial, **Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran** terbukti menjadi faktor yang berpengaruh signifikan dan dominan terhadap efektivitas anggaran, sedangkan variabel lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa akurasi perencanaan dan penetapan target anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran belanja di tingkat kelurahan.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen keuangan sektor publik, khususnya dalam tata kelola anggaran pada pemerintahan tingkat kelurahan. Implikasi praktis penelitian menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penguatan sistem pengendalian internal, dan optimalisasi pengelolaan belanja guna mendukung efektivitas anggaran yang lebih baik.

Kata Kunci: Efektivitas Anggaran, Deviasi Realisasi Anggaran, Serapan Anggaran, Ketepatan Waktu, Tata Kelola Keuangan Kelurahan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the determinants of budget expenditure effectiveness in Joyotakan Urban Village, Serengan District, Surakarta City, during the period 2021–2025. Budget effectiveness is an important indicator in assessing local government financial performance because it reflects the extent to which budget realization achieves predetermined expenditure targets. This research was conducted to provide empirical evidence regarding the factors influencing budget effectiveness at the urban village government level.

This study employed a quantitative approach using quarterly budget realization data obtained from the Budget Implementation Documents (DPA) and Budget Realization Reports (LRA) of Joyotakan Urban Village. The independent variables examined were budget absorption timeliness, budget absorption rate, deviation between budget realization and budget targets, proportion of direct expenditure to the community, and expenditure growth. The dependent variable was budget expenditure effectiveness. Data were analyzed using multiple linear regression preceded by classical assumption tests.

The results indicate that all independent variables simultaneously affect budget expenditure effectiveness. Partially, the deviation between budget realization and budget targets was found to be the only significant and dominant factor influencing budget effectiveness, while the other variables did not show a significant effect. These findings suggest that the accuracy of budget planning and target setting plays a crucial role in improving the effectiveness of budget expenditure management at the urban village level.

This study contributes to the development of public sector financial management, particularly in the area of budget governance at the urban village government level. The practical implications emphasize the importance of improving the quality of budget planning, strengthening internal control systems, and optimizing expenditure management to support better budget effectiveness.

Keywords: Budget Effectiveness, Budget Realization Deviation, Budget Absorption, Timeliness, Public Financial of Urban Village.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terdekat dengan warga, di mana secara struktural berada di bawah kecamatan (*local state government*) untuk melaksanakan urusan publik skala mikro. Studi Okparizan & Septian (2017). menunjukkan bahwa setelah terbitnya UU No. 23/2014, kewenangan kelurahan lebih menonjol pada fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan dasar dibanding fungsi “*steering*” politik, sehingga kinerja kelurahan dipengaruhi kebijakan dan sumber daya dari tingkat di atasnya. Berdasarkan sudut pandang administrasi publik, pemberian kewenangan penuh kepada kelurahan menjadi kebutuhan wajib, guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Pemerintah kelurahan memegang peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan memiliki karakteristik urban yang cukup padat di wilayah Kota Surakarta, dengan tantangan sosial dan ekonomi khas kawasan kota, seperti mobilitas penduduk yang tinggi dan kebutuhan pelayanan yang cepat. Situasi tersebut menuntut pengelolaan anggaran kelurahan yang responsif dan efektif agar program-program pembangunan dan pelayanan dapat berjalan maksimal.

Keberhasilan program kelurahan terkait erat dengan daya dukung anggaran. Anggaran merupakan instrumen kebijakan utama yang digunakan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya publik secara efektif, efisien, dan akuntabel (Mardiasmo, 2009). Di tingkat kelurahan, anggaran menjadi dasar operasional dalam melaksanakan program pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 130 Tahun 2018). Anggaran kelurahan merupakan perwujudan desentralisasi fiskal yang memungkinkan pemerintah paling bawah menjalankan fungsi administratif dan

pelayanan secara mandiri, dalam konteks otonomi daerah. Efektivitas pemanfaatan anggaran kelurahan ditentukan oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penggunaan dana. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap struktur dan mekanisme anggaran di kelurahan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Anggaran bukan sekadar dokumen finansial di level kelurahan, melainkan instrumen untuk menggerakkan pembangunan partisipatif mulai dari sosialisasi UMKM, pelatihan, hingga bantuan modal.

Efektivitas anggaran penting untuk diteliti karena menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan program pembangunan sesuai prioritas dan alokasi yang telah direncanakan. Simamora & Budiwitjaksono (2022) menegaskan bahwa efektivitas belanja daerah, termasuk belanja modal, berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Zein *et al.* (2024) menunjukkan bahwa kinerja keuangan dan belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan apabila dilaksanakan secara efektif. Kusuma & Budiwitjaksono (2023) menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran menjadi tolok ukur penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Efektivitas anggaran menjadi krusial untuk memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Ketepatan waktu penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran di lingkungan instansi pemerintah. Keterlambatan penyerapan anggaran berimplikasi pada tertundanya pelaksanaan program kerja serta menurunnya kualitas pelayanan publik (Santoso *et al.*, 2024). Anggaran yang tidak terserap sesuai waktu yang direncanakan mencerminkan lemahnya perencanaan dan koordinasi antarunit kerja, serta potensi terjadinya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun anggaran (Kuntadi & Dian Rosdiana, 2022). Zulfaturrohman *et al.* (2021) menegaskan bahwa realisasi anggaran yang lambat di sektor pendidikan tinggi berdampak pada rendahnya daya serap terhadap alokasi anggaran dan

mengganggu pencapaian output program secara keseluruhan. Ketepatan waktu penyerapan anggaran berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas penggunaan anggaran publik, termasuk di lingkungan pemerintah kelurahan.

Tingkat Serapan Anggaran merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan yang dirancang dalam dokumen anggaran benar-benar direalisasikan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap efektivitas penggunaan anggaran publik. Penelitian Sutono *et al.* (2022) menunjukkan bahwa rendahnya Tingkat Serapan Anggaran sering kali disebabkan oleh lemahnya perencanaan dan koordinasi lintas unit kerja, yang dapat menghambat pencapaian output dan outcome program. Indikator penyerapan anggaran juga berperan dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah, karena mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran (Safriansah *et al.*, 2021). Serapan anggaran yang tidak optimal dapat menjadi sinyal lemahnya tata kelola keuangan daerah yang berdampak langsung pada rendahnya efektivitas belanja pemerintah.

Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran mencerminkan sejauh mana perencanaan anggaran yang telah ditetapkan mampu diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan anggaran. Ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi menjadi indikator adanya masalah dalam akurasi perencanaan, pelaksanaan teknis, maupun pengelolaan keuangan di instansi pemerintah. Ratnasari (2022) menunjukkan bahwa deviasi terjadi karena beberapa faktor, seperti perubahan kebijakan, keterlambatan proses administrasi, serta kurang optimalnya koordinasi antarunit kerja, yang akhirnya menghambat efektivitas belanja pemerintah. Rahayuningsih & Syaflan (2024) menekankan pentingnya sinkronisasi rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran untuk meminimalkan deviasi yang dapat menyebabkan akumulasi belanja di akhir tahun anggaran serta penurunan kualitas output kegiatan. Oleh karena itu, deviasi anggaran perlu diteliti sebagai variabel yang memengaruhi efektivitas

anggaran, terutama dalam konteks kelurahan, yang mengandalkan anggaran sebagai sumber utama dalam menjalankan program pelayanan dan pembangunan.

Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat adalah bagian dari alokasi anggaran yang secara langsung membiayai pelaksanaan program atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Bawimbang *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa belanja langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, karena anggaran tersebut digunakan untuk pelayanan publik dan kegiatan pembangunan yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat. Tarigan *et al.* (2023) menekankan bahwa penggunaan belanja langsung dalam penganggaran berbasis kinerja mencerminkan efektivitas dalam pencapaian target output program pemerintah daerah. Oleh karena itu, mengukur Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat terhadap efektivitas anggaran menjadi penting, karena menunjukkan sejauh mana kebijakan fiskal daerah berhasil diterjemahkan ke dalam kegiatan yang relevan, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga kelurahan.

Pertumbuhan Belanja daerah merupakan indikator yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Nirwana & Trisuswanto (2023) menyebutkan bahwa Pertumbuhan Belanja yang seimbang dan efisien mampu menciptakan keserasian alokasi anggaran, yang akhirnya mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Fauziah & Ekaningtias (2022) menegaskan bahwa Pertumbuhan Belanja, khususnya yang bersumber dari belanja operasional dan modal, memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah, termasuk dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Penelitian Alifah *et al.* (2023) menemukan bahwa pertumbuhan alokasi anggaran belanja modal dipengaruhi oleh berbagai faktor fiskal dan kebijakan, namun keberlanjutan pertumbuhannya menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemanfaatan anggaran. Dengan demikian, penting untuk meneliti bagaimana Pertumbuhan Belanja dari tahun ke tahun berdampak terhadap

efektivitas anggaran, karena fluktuasi atau pertumbuhan yang tidak terarah dapat menciptakan ketidakefisienan, deviasi anggaran, dan menurunnya capaian program di tingkat kelurahan.

Siklus APBD di tingkat pemerintah kota termasuk kelurahan merupakan rangkaian proses yang kompleks dan krusial bagi pengelolaan keuangan daerah. Siklus tersebut meliputi lima tahap yaitu perencanaan (RPJMD / RKPD), penganggaran (RAPBD/ DPA), pelaksanaan program, pengawasan evaluasi, dan pertanggungjawaban/ pelaporan. Setiap tahapan dalam pengelolaan anggaran memegang peranan krusial dalam menciptakan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada peningkatan mutu layanan publik. Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan program yang didukung oleh integrasi teknologi informasi, serta diakhiri dengan pengawasan dan evaluasi yang melibatkan pengendalian internal maupun eksternal. Seluruh rangkaian ini saling terhubung dan membutuhkan koordinasi antarlembaga, keterbukaan informasi, serta pemanfaatan teknologi guna memastikan realisasi anggaran dapat dipantau setiap triwulan demi tercapainya tujuan pembangunan daerah secara maksimal.

Dalam proses penyusunan anggaran, diperlukan analisis yang komprehensif dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi baik dalam penggunaan maupun alokasinya. Sebab, kesalahan dalam perencanaan atau pengalokasian anggaran dapat berdampak langsung terhadap kondisi keuangan negara. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan instansi pemerintah daerah yang bersangkutan (Kusuma & Budiwitjaksono, 2023). Analisis kinerja pelaksanaan anggaran belanja penting dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran oleh pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Analisis ini dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa LRA terdiri dari Pendapatan-LRA dan belanja.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran dipengaruhi oleh sejumlah faktor teknis dan manajerial. Beberapa di antaranya meliputi ketepatan waktu penyerapan anggaran, Tingkat Serapan Anggaran terhadap pagu, deviasi realisasi anggaran terhadap target yang telah ditetapkan, serta proporsi belanja langsung yang menyentuh masyarakat secara langsung. Selain itu, kecenderungan pertumbuhan atau peningkatan anggaran belanja dari tahun ke tahun juga menunjukkan pola konsistensi dan keberlanjutan kebijakan pemerintah kelurahan. Analisis terhadap variabel-variabel tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan anggaran berdampak terhadap efektivitas belanja.

Penelitian tentang efektivitas anggaran belanja di kelurahan menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai kinerja pengelolaan anggaran di tingkat akar rumput. Kelurahan Joyotakan, yang berada di Kecamatan Serengan Kota Surakarta memiliki kompleksitas sosial untuk mengukur dan menganalisis efektivitas anggaran relevan serta efektivitas pelayanan publik. Ketepatan waktu penyerapan anggaran menunjukkan kemampuan kelurahan dalam menjalankan program sesuai jadwal sehingga menghindari keterlambatan pelaksanaan yang dapat menurunkan kualitas hasil. Tingkat Serapan Anggaran mencerminkan seberapa besar anggaran yang dialokasikan telah benar-benar digunakan untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Deviasi realisasi terhadap target menandakan selisih antara rencana dan capaian, yang menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas anggaran. Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat menunjukkan keterkaitan anggaran dengan langsung manfaat bagi warga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Sementara itu, Pertumbuhan Belanja antar tahun merefleksikan komitmen serta konsistensi penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Data realisasi anggaran tahun 2021–2025 dapat menjadi dasar evaluasi pelaksanaan anggaran dan implikasinya terhadap capaian program dan kegiatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana berbagai faktor keuangan memengaruhi efektivitas anggaran belanja di tingkat kelurahan yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam penelitian administrasi publik serta menjadi rekomendasi bagi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di masa mendatang.

B. Identifikasi Masalah

Pengelolaan anggaran di tingkat kelurahan memiliki peran krusial dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik. Dalam lima tahun terakhir (2021–2025), Kelurahan Joyotakan telah mengalokasikan anggaran tahunan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun efektivitas penggunaannya belum sepenuhnya diketahui secara kuantitatif. Beberapa indikasi seperti realisasi anggaran yang belum merata tiap triwulan, deviasi antara target dan pelaksanaan, serta proporsi belanja yang belum optimal menyentuh masyarakat langsung, menunjukkan adanya potensi ketidakefisienan dalam pelaksanaan anggaran.

Fenomena ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh mengenai pelaksanaan anggaran, baik dari sisi ketepatan waktu, tingkat serapan, maupun alokasi belanja untuk sub-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jika pelaksanaan anggaran tidak dikelola dengan baik, maka potensi pencapaian efektivitas anggaran sebagai alat pelayanan publik menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor pelaksanaan anggaran yang memengaruhi efektivitas belanja kelurahan agar dapat menjadi dasar perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat kelurahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah untuk menguji:

1. Apakah ketepatan waktu penyerapan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas anggaran?
2. Apakah tingkat serapan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas anggaran?
3. Apakah deviasi realisasi target anggaran berpengaruh terhadap efektivitas anggaran?
4. Apakah proporsi belanja langsung kepada masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas anggaran?
5. Apakah pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap efektivitas anggaran?

D. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian hanya dilakukan di Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
2. Periode data yang digunakan terbatas pada tahun 2021 sampai dengan 2025;
3. Data yang dianalisis bersumber dari dokumen anggaran kelurahan seperti Rencana Anggaran, DPA, laporan realisasi anggaran triwulanan, serta laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan;
4. Efektivitas anggaran belanja diukur menggunakan rasio antara realisasi anggaran dengan target atau pagu yang direncanakan per tahun;
5. Pelaksanaan anggaran dalam penelitian ini dibatasi pada lima variabel:
 - a. Ketepatan waktu penyerapan anggaran;
 - b. Tingkat penyerapan anggaran;
 - c. Deviasi realisasi terhadap target;
 - d. Proporsi belanja langsung yang menyasar masyarakat;
 - e. Pertumbuhan anggaran belanja dari tahun ke tahun

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh ketepatan waktu penyerapan anggaran terhadap efektivitas anggaran;
2. Menguji dan menganalisis tingkat penyerapan anggaran terhadap efektivitas anggaran;
3. Menguji dan menganalisis deviasi realisasi target anggaran terhadap efektivitas anggaran;
4. Menguji dan menganalisis proporsi belanja langsung kepada masyarakat terhadap efektivitas anggaran;
5. Menguji dan menganalisis pertumbuhan belanja terhadap efektivitas anggaran;

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan keuangan daerah, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan anggaran di tingkat kelurahan;
 - b. Menjadi referensi akademik untuk penelitian serupa yang membahas hubungan antara pelaksanaan anggaran dan efektivitas anggaran belanja publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Kota Surakarta dan Kelurahan Joyotakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam perbaikan strategi pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran;
 - b. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merancang sistem penganggaran dan evaluasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kerangka Teori

1. Teori Penganggaran Publik

a. Pengertian Penganggaran Publik

Penganggaran publik merupakan proses perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan sumber daya keuangan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Proses ini mencerminkan kebijakan publik dan menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Mardiasmo (2021), penganggaran publik bukan sekadar proses teknis, tetapi juga merupakan proses politik, karena melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda.

b. Tujuan Penganggaran Publik

- 1) Menyediakan pedoman pembelanjaan negara/daerah;
- 2) Menyelaraskan antara pendapatan dan belanja;
- 3) Menjamin akuntabilitas dan transparansi;
- 4) Menjadi alat untuk distribusi dan stabilisasi ekonomi.

Beberapa pendekatan teori penganggaran publik yang banyak digunakan dan relevan dengan penelitian ini, antara lain :

1) Incremental Budgeting Theory

Teori ini berasumsi bahwa penganggaran dilakukan dengan penyesuaian kecil dari anggaran tahun sebelumnya, tanpa perubahan besar. Menurut Suaib *et al.* (2022), ini adalah metode paling umum karena lebih realistis secara politis dan administratif.

2) Performance-Based Budgeting (PBB)

Menekankan hubungan antara alokasi anggaran dengan kinerja. Pemerintah harus menunjukkan output atau outcome yang dihasilkan dari dana yang digunakan. Teori ini banyak dipakai

dalam era reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3) Zero-Based Budgeting (ZBB)

Dalam pendekatan ini, setiap kegiatan harus dijustifikasi dari nol tanpa mengacu pada anggaran sebelumnya. Teori ini bertujuan untuk efisiensi dan penghapusan kegiatan yang tidak produktif.

c. Siklus dan Proses Penganggaran Publik

Proses penganggaran terdiri dari beberapa tahap: perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di Indonesia, siklus ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa teori-teori penganggaran publik seperti incremental budgeting, performance-based budgeting, hingga public choice theory telah banyak dibahas dan diterapkan dalam konteks pengelolaan anggaran secara umum di tingkat nasional maupun daerah.

2. Efektivitas Anggaran

a. Pengertian anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan terperinci mengenai kegiatan suatu entitas untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Menurut Mardiasmo (2021), anggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan dalam unit kuantitatif (umumnya dalam satuan uang) untuk periode tertentu. Dalam pengelolaan keuangan daerah, anggaran memiliki peran sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan pelaksanaan program serta memastikan penggunaan sumber daya publik berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Nurhayati & Teguh, 2025: 85).

Anggaran dalam pemerintahan mencerminkan prioritas pembangunan dan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting. Oleh karena itu, efektivitas dalam implementasi anggaran sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik (Halim & Abdullah, 2020).

b. Efektivitas anggaran

Efektivitas anggaran menggambarkan sejauh mana anggaran yang telah direncanakan dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan hubungan antara output yang dihasilkan dan tujuan yang ingin dicapai (Hertina *et al.*, 2023).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, efektivitas anggaran tercermin dari tingkat pencapaian output program, kesesuaian penggunaan dana dengan prioritas daerah, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik (Sandy Sevana *et al.*, 2025). Anggaran yang efektif ditandai dengan realisasi belanja yang sesuai perencanaan, output yang terukur, serta capaian kinerja yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas anggaran

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas anggaran antara lain:

- 1) Perencanaan Anggaran: Kualitas perencanaan menentukan keakuratan alokasi anggaran. Perencanaan yang baik memperhatikan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi keuangan daerah (Sandy Sevana *et al.*, 2025).
- 2) Pelaksanaan Anggaran: Keterlambatan pelaksanaan dan lemahnya pengawasan menyebabkan ketidaksesuaian realisasi dengan rencana (Suharyadi & Purwanto, 2020).
- 3) Komitmen dan Kompetensi SDM: Kompetensi aparatur dan komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang akuntabel mempengaruhi efektivitas (Halim & Abdullah, 2020).

4) Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan internal dan eksternal berperan dalam memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (Sandy Sevana et al., 2025).

d. Indikator efektivitas anggaran

Menurut (Nurhayati & Teguh, 2025), efektivitas anggaran dapat dinilai melalui tingkat pencapaian realisasi anggaran terhadap target yang telah ditetapkan, keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan dalam mencapai sasaran kinerja, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan, serta efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Berdasarkan studi pustaka yang telah diuraikan, penulis melihat adanya kesenjangan penelitian pada tingkat pemerintahan terkecil, khususnya di tingkat kelurahan. Banyak penelitian terdahulu lebih menyoroti efektivitas anggaran di tingkat pemerintah daerah secara umum, namun belum mengkaji secara spesifik dinamika pelaksanaan anggaran di kelurahan yang memiliki kompleksitas tersendiri, baik dari sisi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, hingga realisasi program.

3. Ketepatan Waktu Penyerapan

a. Penyerapan anggaran

Penyerapan anggaran menunjukkan tingkat realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBD. Tingkat penyerapan yang optimal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran secara efektif sehingga program yang direncanakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai target yang ditetapkan (Dilliana & Herdi, 2022: 11), penyerapan anggaran yang tinggi mengindikasikan kapasitas kelembagaan yang baik, manajemen program yang efisien, serta tata kelola yang efektif.

Namun demikian, rendahnya penyerapan anggaran masih menjadi isu yang terus berulang, terutama menjelang akhir tahun

anggaran. Hal ini berdampak terhadap akumulasi pelaksanaan proyek di akhir tahun, kualitas belanja yang rendah, dan tidak maksimalnya manfaat bagi masyarakat (BPK RI, 2020).

b. Ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran

Ketepatan waktu penyerapan anggaran merujuk pada sejauh mana proses pelaksanaan kegiatan dan belanja daerah dilakukan sesuai dengan jadwal dan tahapan waktu yang telah direncanakan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan kegiatan diharapkan mengikuti kalender anggaran, dimulai sejak awal tahun anggaran agar distribusi pembelanjaan lebih merata dan hasil program dapat dirasakan lebih dini oleh masyarakat.

Ketidaktepatan waktu dalam penyerapan anggaran berakibat pada penumpukan kegiatan di triwulan akhir, keterlambatan pembayaran, serta potensi silpa (siswa lebih perhitungan anggaran) yang besar. Hal ini menandakan lemahnya perencanaan dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (Halim & Abdullah, 2006)

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyerapan anggaran

Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi Ketepatan waktu penyerapan anggaran. Di antaranya adalah: (1) kualitas perencanaan program dan kegiatan; (2) kesiapan administrasi pengadaan barang dan jasa; (3) kapasitas sumber daya manusia; (4) sistem pengendalian internal; dan (5) kepemimpinan serta komitmen kepala perangkat daerah (Mardiasmo, 2021).

Rachman *et al* (2020) dalam kajian di Kota Bogor menggunakan Exploratory Factor Analysis (EFA) untuk mengidentifikasi lima faktor utama penyebab keterlambatan penyerapan anggaran: perencanaan anggaran, regulasi dan birokrasi yang kompleks, kondisi kerja yang tidak mendukung, kendala keuangan dan penyaluran dana, serta kompetensi SDM ASN. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sekretariat

Daerah memegang peran kunci dalam merumuskan strategi untuk memperbaiki kualitas penyerapan melalui perbaikan perencanaan dan pengadaan.

d. Dampak ketepatan waktu penyerapan terhadap efektivitas anggaran

Ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran sangat berkaitan erat dengan efektivitas anggaran itu sendiri. Ketika anggaran diserap sesuai waktu, maka output dan outcome dari program kegiatan dapat dihasilkan dengan baik dan tepat sasaran. Menurut Suparmoko (2002), ketepatan waktu penyerapan akan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, memperkecil potensi pemborosan, serta mendorong peningkatan layanan publik secara optimal.

Sebaliknya, keterlambatan penyerapan anggaran akan mengakibatkan proyek molor, kualitas pekerjaan yang rendah, serta manfaat yang tertunda untuk masyarakat. Efektivitas anggaran juga menurun karena dana yang tersedia tidak termanfaatkan sesuai potensi maksimalnya (Mahmudi., 2019).

Isu ketepatan waktu penyerapan anggaran telah banyak diteliti dalam berbagai konteks pemerintahan daerah, baik dari sisi faktor penyebab maupun dampaknya terhadap efektivitas anggaran. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek teknis pelaksanaan anggaran secara umum, tanpa mengelaborasi secara mendalam hubungan antara ketepatan waktu dengan efektivitas belanja daerah pada satuan wilayah terkecil seperti kelurahan.

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis ketepatan waktu penyerapan anggaran dalam konteks pelaksanaan anggaran belanja kelurahan, yang hingga saat ini masih relatif terbatas kajiannya. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini akan memadukan data realisasi anggaran dengan evaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan secara langsung di lapangan selama periode lima tahun terakhir (2021–2025).

4. Tingkat Serapan Anggaran

a. Konsep Serapan Anggaran

Tingkat serapan anggaran merujuk pada besaran realisasi penggunaan dana yang telah dianggarkan dalam suatu tahun anggaran. Serapan anggaran menjadi indikator utama efektivitas pelaksanaan anggaran, di mana semakin tinggi tingkat serapan, maka semakin besar pula program dan kegiatan yang telah direalisasikan sesuai rencana (Mardiasmo, 2021).

Serapan anggaran tidak hanya menunjukkan performa administratif, tetapi juga menunjukkan kualitas perencanaan dan pengendalian program di suatu organisasi publik. Rendahnya serapan anggaran dapat menjadi pertanda adanya hambatan dalam pelaksanaan program, mulai dari proses pengadaan, keterlambatan pelaksanaan fisik, hingga permasalahan teknis dan administratif lainnya (Dilliana & Herdi, 2022).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat serapan anggaran

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi tingkat serapan anggaran, antara lain:

- 1) Kualitas Perencanaan: Ketidaktepatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sering kali menyebabkan revisi anggaran dan keterlambatan dalam pelaksanaan program (Abdullah, 2004).
- 2) Proses Pengadaan Barang dan Jasa: Proses lelang atau tender yang lambat, gagal tender, dan rendahnya partisipasi penyedia barang/jasa turut berkontribusi pada rendahnya penyerapan (Perpres No. 16 Tahun 2018).
- 3) Kapabilitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai, khususnya dalam pemahaman teknis dan akuntansi pengelolaan keuangan daerah, dapat menghambat pelaksanaan serta efektivitas realisasi anggaran pemerintah daerah (Djunaedi et al., 2024: 112).

- 4) Kepemimpinan dan Komitmen Pimpinan Daerah: Kepemimpinan strategis dan kemampuan manajerial kepala daerah atau kepala OPD memengaruhi percepatan pelaksanaan program (Indriani, 2020).
- 5) Pengawasan dan Evaluasi: Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi internal menyebabkan keterlambatan deteksi dan penyelesaian permasalahan yang muncul di lapangan (Mardiasmo, 2021).

c. Dampak rendahnya serapan anggaran

Serapan anggaran yang rendah berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik, tertundanya program pembangunan, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, serapan anggaran yang tidak maksimal juga berimplikasi terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang tinggi, sehingga mengindikasikan adanya dana yang tidak dimanfaatkan sesuai target tahunan (Sihombing, 2021).

Dalam jangka panjang, rendahnya serapan dapat menyebabkan inefisiensi fiskal dan memengaruhi alokasi anggaran di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor penyebab rendahnya realisasi agar dapat memperbaiki sistem penganggaran secara menyeluruh.

d. Strategi meningkatkan serapan anggaran

Beberapa strategi yang disarankan untuk meningkatkan tingkat serapan anggaran antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan penguatan manajemen keuangan daerah.
- 2) Reformasi perencanaan dan penganggaran, seperti penerapan e-planning dan e-budgeting untuk meningkatkan akurasi dan transparansi.
- 3) Penyederhanaan proses pengadaan, terutama dalam pengadaan langsung dan tender cepat.

- 4) Peningkatan pengawasan dan sistem insentif, termasuk reward and punishment berbasis kinerja penyerapan anggaran (BPKP, 2020).

Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih adaptif dan responsif dalam mengelola keuangan, terutama dalam rangka mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini mengangkat fokus pada tingkat serapan anggaran di level kelurahan, yang relatif masih jarang dikaji secara mendalam dibandingkan dengan kajian serupa di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Dengan menitikberatkan pada konteks pelaksanaan anggaran kelurahan, khususnya dalam pelaksanaan program yang bersifat pelayanan langsung ke masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris mengenai efektivitas desentralisasi fiskal di tingkat paling bawah.

Selain itu, pendekatan yang digunakan penulis tidak hanya menyoroti sisi keuangan, tetapi juga akan mengintegrasikan aspek sosial dan partisipatif dalam proses realisasi anggaran di lingkungan kelurahan. Penelitian ini mencoba menjembatani kesenjangan antara aspek administratif dan realitas di lapangan dalam konteks pengelolaan anggaran publik.

5. Deviasi antara target dan realisasi

a. Konsep dan definisi deviasi target realisasi

Deviasi atau selisih antara target dan realisasi merupakan perbedaan kuantitatif antara apa yang direncanakan dan apa yang terealisasi. Secara konseptual, gap semacam itu dapat terjadi pada berbagai dimensi pengelolaan anggaran, seperti waktu pelaksanaan, kualitas, dan output kegiatan, yang lazim dihitung dengan formula persentase varians, yaitu $\text{varians (\%)} = ((\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana}) \times 100\%$. Dalam konteks anggaran, deviasi yang negatif mengindikasikan kinerja yang belum optimal, sementara deviasi positif

dapat mengindikasikan kelebihan capaian (over-performance) atau penggunaan sumber daya yang kurang efisien.

b. Faktor Penyebab Deviasi

1) Perencanaan yang tidak akurat

Berdasarkan studi Ratnasari (2022) pada Kantor Pertanahan Bojonegoro, deviasi ribuan dapat muncul karena perencanaan anggaran yang “tidak ideal”, lemahnya koordinasi internal, dan keterbatasan SDM. Rahayuningsih & Syaflan (2024) menyebutkan faktor seperti jadwal belanja yang menurun, revisi DIPA tanpa pemutakhiran, dan negosiasi yang terlambat menyebabkan penyimpangan dana.

2) Koordinasi dan kompetensi SDM

Koordinasi antar tim, baik lintas sektoral maupun internal, menjadi kunci agar rencana dan realisasi selaras. Dalam penelitian di lingkup Kementerian Agama Bangka Belitung, (Arnida, 2022) menyimpulkan bahwa koordinasi yang buruk dan rendahnya kualitas DIPA mengakibatkan deviasi pada halaman III DIPA. Daya serap anggaran yang rendah pada awal tahun juga ditengarai karena kurangnya pemahaman dan kesiapan SDM serta proses yang tumpang tindih.

3) Faktor organisasi dan sistem

Penelitian Yusuf & Muthi'ah, (2019) menunjukkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran pada awal tahun berpotensi menyebabkan penumpukan realisasi anggaran pada triwulan IV. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor perencanaan, pelaksanaan kegiatan, kualitas sumber daya manusia, serta proses pengadaan barang dan jasa yang belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil studi terdahulu yang telah dikaji, mayoritas penelitian mengenai deviasi antara target dan realisasi cenderung berfokus pada level pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, atau organisasi vertikal kementerian. Penelitian-penelitian tersebut

umumnya bersifat deskriptif dan terbatas pada satu atau dua tahun anggaran, tanpa menelusuri dampak jangka menengah terhadap efektivitas anggaran secara menyeluruh.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki nilai orisinalitas pada tiga aspek utama. Pertama, dari segi objek dan rentang waktu, fokus penelitian ini adalah pada Belanja Kelurahan Joyotakan selama periode lima tahun berturut-turut (2021–2025), yang masih sangat jarang dilakukan dalam lingkup kelurahan. Hal ini memungkinkan analisis longitudinal yang lebih mendalam mengenai pola deviasi dan tren efektivitas anggaran di tingkat mikro.

Kedua, berdasarkan pendekatan metodologis, penelitian ini menggabungkan analisis kuantitatif (dengan teknik analisis varian dan deviasi target-realisasi) dan pendekatan kualitatif (melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan kelurahan seperti Lurah, Ketua RW/RT, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pengurus LPMK, dan PKK). Kombinasi pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor penyebab deviasi dan dampaknya terhadap capaian program dan kepuasan masyarakat.

Ketiga, berdasarkan hasil identifikasi dan analisis data lapangan, penelitian ini akan menyusun kerangka mitigasi deviasi yang bersifat operasional dan kontekstual, dengan mengembangkan dashboard monitoring sederhana berbasis indikator kinerja anggaran dan sistem pelaporan berjenjang. Model ini diharapkan menjadi rujukan strategis bagi kelurahan lain dalam mengelola deviasi secara lebih proaktif dan akuntabel.

6. Proporsi belanja langsung kepada masyarakat

a. Konsep belanja daerah

Belanja daerah merupakan komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasional dan belanja modal, serta dibedakan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

b. Belanja langsung kepada masyarakat

Belanja langsung kepada masyarakat mencakup pembiayaan kegiatan pembangunan yang hasilnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar (jalan lingkungan, saluran air, sanitasi), bantuan sosial produktif, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Kementerian Dalam Negeri dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, belanja langsung dapat dilaksanakan melalui mekanisme swakelola oleh masyarakat atau oleh pihak ketiga. Proporsi belanja langsung menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput (Permendagri No. 77 Tahun 2020).

c. Teori alokasi dan efektivitas anggaran

Teori alokasi anggaran publik menyatakan bahwa belanja pemerintah yang efektif harus dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Suparmoko (2002) menyebutkan bahwa fungsi alokasi bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik secara efisien. Dalam konteks daerah, alokasi belanja langsung mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merespons aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap proporsi belanja langsung menjadi penting untuk menilai efektivitas anggaran dalam memberikan dampak nyata.

d. Analisis proporsi belanja langsung

Analisis proporsi belanja langsung dapat dilakukan dengan membandingkan nilai belanja langsung terhadap total belanja daerah

dalam periode tertentu. Semakin tinggi proporsi belanja langsung terhadap masyarakat, maka dapat diasumsikan semakin tinggi pula keberpihakan anggaran terhadap kepentingan publik. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI (2020) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020, kecenderungan belanja tidak langsung yang mendominasi menunjukkan kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran.

e. Faktor yang mempengaruhi besaran belanja langsung

Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja langsung antara lain kapasitas fiskal daerah, pola kepemimpinan kepala daerah, mekanisme perencanaan partisipatif, serta kemampuan teknis aparatur dalam menyusun kegiatan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa pelibatan masyarakat dalam forum Musrenbang menjadi salah satu kunci agar belanja publik benar-benar tepat sasaran (Kementerian Dalam Negeri, 2017).

Berdasarkan kajian literatur yang telah diuraikan sebelumnya, sebagian besar penelitian dan regulasi hanya membahas belanja langsung secara umum sebagai bagian dari klasifikasi belanja daerah. Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik menyoroti Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat sebagai indikator keberpihakan anggaran dalam konteks pemerintahan kelurahan atau tingkat lokal. Selain itu, masih minim pendekatan evaluatif yang mengaitkan antara besarnya proporsi belanja langsung dengan efektivitas pencapaian program pembangunan berbasis masyarakat.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada analisis Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat, baik secara kuantitatif maupun dalam konteks implementasi anggaran di tingkat kelurahan. Dengan menggunakan data riil pada periode 2021–2025 dan mengaitkannya dengan efektivitas pelaksanaan program kelurahan, diharapkan studi ini memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap

upaya perencanaan anggaran yang lebih partisipatif, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat.

7. Pertumbuhan anggaran belanja

a. Landasan teori pertumbuhan anggaran

Pertumbuhan anggaran belanja merupakan fenomena meningkatnya pagu dan realisasi belanja pada periode tertentu. Secara teori, hal ini erat kaitannya dengan teori fiskal dan pemerintahan daerah, di mana peningkatan belanja diharapkan mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori penting:

- 1) **Teori Keynesian**, yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat merangsang permintaan agregat, sehingga meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi (Alifah *et al.*, 2023)
- 2) **Teori desentralisasi fiskal**, yang berpendapat bahwa alokasi anggaran yang lebih otonom di daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran daerah serta berdampak pada pembangunan lokal

b. Definisi pertumbuhan anggaran

Pertumbuhan anggaran didefinisikan sebagai selisih persentase antara pagu anggaran belanja pada dua periode berturut-turut. Nugroho & Slamet (2018) mengukur pertumbuhan anggaran sebagai perbedaan anggaran belanja daerah tahun ini dibanding tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persen. Terminologi ini umum digunakan dalam analisis fiskal untuk memantau dinamika belanja publik dan sebagai indikator ekspansi fiskal.

c. Dampak pertumbuhan anggaran

Pertumbuhan anggaran belanja merupakan peningkatan nominal atau persentase belanja pemerintah dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya ekspansi fiskal yang dapat berimplikasi terhadap pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan yang efisien.

Menurut Halim (2007), pertumbuhan anggaran belanja daerah dapat menjadi indikator peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Namun, apabila pertumbuhan anggaran tidak diimbangi dengan kualitas perencanaan dan implementasi yang baik, maka peningkatan anggaran justru dapat menimbulkan pemborosan (*inefficiency*).

Selain itu, Pertumbuhan Belanja yang tidak terkendali dapat menyebabkan tekanan terhadap keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*), terutama jika tidak diiringi oleh pertumbuhan pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Mardiasmo (2021) menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan daerah, agar tidak memicu defisit yang dapat membebani anggaran pada periode-periode berikutnya.

Belanja pemerintah daerah yang dialokasikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta aktivitas ekonomi masyarakat sehingga memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian daerah (Asnidar et al., 2025).

d. Analisis Pertumbuhan Anggaran

Analisis pertumbuhan anggaran merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat perubahan belanja dalam kurun waktu tertentu, baik secara total maupun berdasarkan fungsi atau jenis belanja. Analisis ini penting untuk menilai prioritas kebijakan, efisiensi alokasi, serta tren belanja pemerintah.

Menurut Yusuf & Muthi'ah, (2019), pendekatan yang umum digunakan dalam analisis ini adalah *growth analysis*, yaitu membandingkan pertumbuhan aktual dengan rencana atau tahun sebelumnya, serta *trend analysis* untuk melihat kecenderungan pertumbuhan dalam jangka panjang. Selain itu, analisis varian

(*deviation analysis*) juga digunakan untuk menilai penyimpangan antara rencana dan realisasi anggaran.

Analisis pertumbuhan anggaran juga menjadi alat evaluasi atas kinerja fiskal pemerintah. Seperti yang diuraikan oleh Harun (2011), pertumbuhan yang tinggi pada belanja operasional dibandingkan belanja modal bisa menunjukkan pola belanja yang kurang produktif. Oleh karena itu, struktur belanja juga perlu dianalisis bersamaan dengan angka pertumbuhannya.

Dalam konteks pemerintah daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 juga menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi anggaran melalui indikator pertumbuhan anggaran dan capaian kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas keuangan daerah.

B. Penelitian Yang Relevan

1. Efektivitas Anggaran

Simamora & Budiwitjaksono (2022) melakukan penelitian di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara pada periode 2018–2020 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, Zein *et al.*, (2024) meneliti di Provinsi Banten pada periode 2018–2022, menggunakan model analisis regresi panel untuk menguji peran kinerja keuangan daerah dan belanja modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Kusuma & Budiwitjaksono (2023) fokus pada efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja di Pemerintah Kabupaten Gresik, menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dengan rasio efektivitas dan efisiensi untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran. Hasil-hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan dan pemanfaatan anggaran, baik dari sisi perencanaan maupun realisasi,

sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan pembangunan daerah, sehingga relevan sebagai dasar konseptual dalam mengkaji efektivitas anggaran. Studi-studi ini memberikan dasar untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara pelaksanaan anggaran dan efektivitas anggaran pada tingkat kelurahan.

2. Ketepatan Waktu Penyerapan

Penelitian oleh Zulfaturrohman *et al.*, (2021) menelaah keterlambatan penyerapan anggaran di sektor pendidikan tinggi pada salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia selama periode anggaran 2019–2020. Dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa realisasi anggaran yang melambat terutama terjadi pada triwulan pertama dan kedua, dipengaruhi oleh proses administrasi yang panjang dan keterlambatan pengadaan. Sementara itu, Kuntadi & Dian Rosdiana (2022) melakukan studi pada penyerapan anggaran belanja pendidikan di Jawa Barat pada tahun 2021 dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor perencanaan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas koordinasi antarpihak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu realisasi anggaran.

Selanjutnya, S. Santoso *et al.*, (2024) meneliti penyerapan anggaran pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 2022–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memaparkan bahwa hambatan teknis dan administrasi, termasuk proses verifikasi dokumen, menjadi penyebab utama keterlambatan penyerapan pada awal tahun anggaran. Adapun Weni Febriani *et al.*, (2023) meneliti satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah pembayaran KPPN Jambi pada tahun anggaran 2021 dengan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia, kesiapan dokumen, dan proses pengadaan memiliki pengaruh signifikan

terhadap keterlambatan penyerapan anggaran, yang berdampak langsung pada ketidaktepatan waktu realisasi.

Secara keseluruhan, dari berbagai hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran sangat dipengaruhi oleh perencanaan, regulasi, koordinasi, dan komitmen pelaksana. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, aspek-aspek tersebut menjadi variabel penting yang patut dikaji lebih lanjut guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.

3. Tingkat Serapan Anggaran

Penelitian Maspaitea *et al.* (2024) tentang pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan akurasi perencanaan kas terhadap tingkat serapan anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Probolinggo. Studi ini menggunakan data tahun anggaran terkini yang diambil pada periode penelitian 2023, dengan analisis regresi linier berganda sebagai metode pengujian hipotesis. Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat serapan anggaran, sedangkan akurasi perencanaan kas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Sutono *et al.* (2022) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja pusat di daerah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penelitian ini menggunakan data realisasi anggaran tahun 2020 dari berbagai satker pusat yang tersebar di Indonesia, dengan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menganalisis hubungan antar variabel. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kualitas perencanaan, kinerja pelaksanaan kegiatan, dan kecepatan proses administrasi berpengaruh signifikan

terhadap tingkat penyerapan anggaran, sedangkan faktor eksternal seperti perubahan kebijakan bersifat moderasi negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Safriansah *et al.* (2021) mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan indikator tingkat serapan anggaran di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data realisasi APBD periode 2018–2019 dan menganalisisnya dengan metode descriptive quantitative analysis yang dipadukan dengan indikator kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki tingkat serapan anggaran di bawah target optimal, terutama pada triwulan awal, yang disebabkan oleh keterlambatan proses pengadaan dan kurangnya kesiapan dokumen perencanaan. Sementara itu, studi Llanas & Llanas (2024) meneliti tingkat pemanfaatan anggaran (budget utilization rate) pada universitas negeri di Filipina dalam kaitannya dengan kinerja State Universities and Colleges (SUC) Leveling. Penelitian ini menggunakan data tahun 2022–2023 dengan model analisis korelasi Pearson dan menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara tingkat serapan anggaran dan peningkatan peringkat SUC.

4. Deviasi Target dan Realisasi

Penelitian Ratnasari (2022) mengkaji deviasi antara target dan realisasi belanja pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2020–2021. Lokasi penelitian difokuskan pada lingkup instansi pemerintah pusat di daerah, dengan tujuan memahami penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif, menganalisis data DIPA dan laporan realisasi anggaran, serta mengidentifikasi faktor keterlambatan administrasi dan proses pengadaan sebagai pemicu deviasi. Temuan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dan pelaksanaan kegiatan menyebabkan serapan anggaran tidak optimal.

Annisa' Nur Fitriani & Nur Hayati (2024) melakukan analisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun selama periode 2018–2022. Penelitian ini menitikberatkan pada tingkat efektivitas penyerapan anggaran daerah, yang diukur melalui rasio realisasi terhadap target setiap tahun. Model analisis yang digunakan adalah analisis rasio kinerja keuangan daerah yang diinterpretasikan secara deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar tahun memiliki tingkat penyerapan yang baik, terdapat fluktuasi signifikan pada tahun-tahun tertentu yang disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan program dan perubahan prioritas kebijakan daerah.

Rahayuningsih & Syaflan (2024) meneliti sinkronisasi antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran pada tahun 2022, dengan objek Kementerian/Lembaga yang mengelola anggaran belanja di tingkat pusat. Lokasi penelitian berada pada lingkungan instansi pemerintah pusat dengan fokus pada optimalisasi serapan dana. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan membandingkan jadwal penarikan dana pada DIPA terhadap data realisasi bulanan. Hasilnya menunjukkan adanya deviasi signifikan pada triwulan pertama akibat keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sementara triwulan akhir cenderung mengalami percepatan realisasi untuk mengejar target serapan.

Simanjuntak *et al.* (2022) meneliti faktor penyebab deviasi anggaran pada Pendapatan Desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo pada tahun anggaran berjalan. Penelitian ini mengamati tingkat penyerapan dana desa yang tidak sejalan dengan target yang telah direncanakan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat serapan disebabkan oleh faktor keterbatasan kapasitas aparatur desa, hambatan dalam pengadaan barang/jasa, dan kendala teknis lapangan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa deviasi serapan anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh perencanaan, tetapi juga oleh kapasitas pelaksana di tingkat lokal.

Komparasi lintas studi tersebut menunjukkan bahwa deviasi target–realisasi muncul di berbagai sektor—anggaran kementerian, penerimaan pajak, hingga jadwal proyek—dengan akar persoalan yang serupa: kualitas perencanaan, koordinasi, dan respons adaptif terhadap perubahan eksternal. Namun, belum banyak penelitian yang menguji secara longitudinal bagaimana deviasi memengaruhi efektivitas belanja pada tingkat kelurahan dalam rentang waktu lima tahun berturut-turut.

5. Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat

Penelitian oleh Bawimbang *et al.* (2021) di Kota Manado untuk periode tahun 2010–2019, dalam menganalisis pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung, dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang langsung menyentuh masyarakat dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan.

Tarigan *et al.* (2023) meneliti penggunaan anggaran belanja langsung dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja di Bappeda Kota Pematangsiantar untuk periode tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa belanja langsung yang terencana dengan indikator kinerja yang jelas mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan daerah, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian oleh Ernawati *et al.* (2021) berfokus pada implementasi kebijakan Dana Desa di Indonesia sebagai instrumen belanja langsung kepada masyarakat, dengan periode pengamatan tahun 2015–2019. Penulis menggunakan model panel data untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan inklusif daerah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa alokasi dana yang langsung ditujukan kepada masyarakat desa memiliki hubungan positif dengan peningkatan pertumbuhan inklusif, terutama di wilayah pedesaan dengan akses infrastruktur terbatas.

Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian berfokus pada pengukuran Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat terhadap total anggaran belanja kelurahan dalam kurun waktu 2021–2025, yang berlokasi di Kelurahan Joyotakan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak melihat pengaruh belanja langsung pada tingkat kemiskinan, kinerja pembangunan, atau pertumbuhan inklusif dalam lingkup kota/kabupaten atau nasional, penelitian ini menitikberatkan pada deviasi antara target dan realisasi anggaran serta kaitannya dengan efektivitas belanja di tingkat kelurahan. Hal ini diharapkan dapat memberikan perspektif mikro yang lebih rinci mengenai optimalisasi anggaran publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

6. Pertumbuhan anggaran belanja

Penelitian yang dilakukan oleh Nirwana & Trisuswanto (2023) menganalisis efisiensi, pertumbuhan, dan keserasian belanja daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Studi ini menggunakan data periode tertentu dengan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif untuk mengukur tingkat Pertumbuhan Belanja serta kesesuaiannya dengan target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa Pertumbuhan Belanja daerah harus dikelola secara optimal untuk mencapai efisiensi, serta menekankan pentingnya proporsi alokasi belanja yang seimbang antar sektor.

Penelitian Nini *et al.* (2019) meneliti anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panglima Sebaya Kabupaten Paser. Periode penelitian yang diambil mencakup data anggaran tahunan rumah sakit, dengan metode analisis deskriptif untuk membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran yang

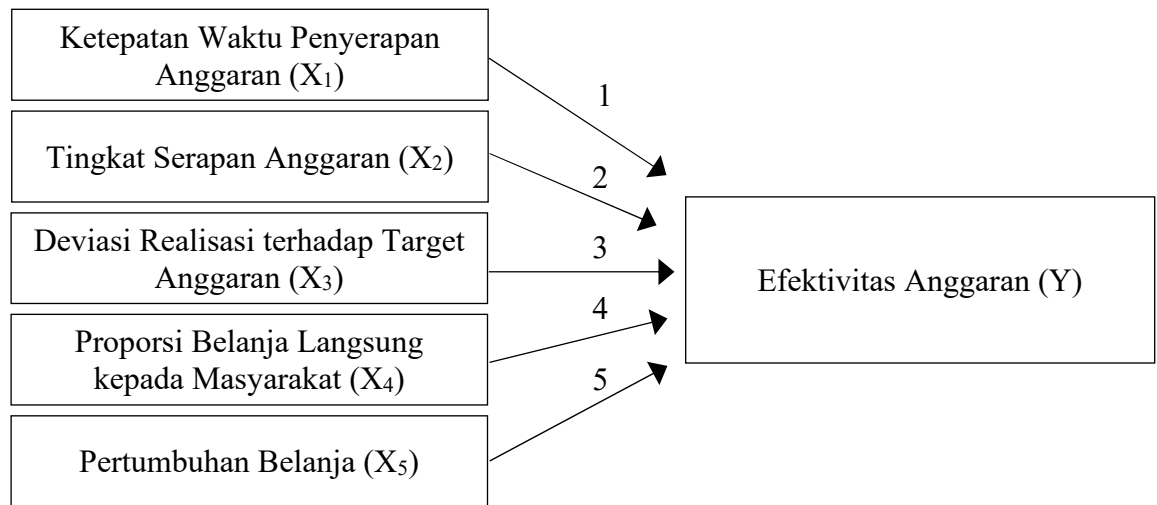
telah direncanakan. Studi ini menemukan bahwa Pertumbuhan Belanja yang tidak terkendali dapat memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran, sehingga diperlukan pengendalian yang baik untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan.

Oktaviani *et al.* (2021) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah (government expenditure) dan modal manusia (human capital) terhadap tren pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2014–2023. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi untuk menguji hubungan antara Pertumbuhan Belanja pemerintah dan perkembangan ekonomi nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa Pertumbuhan Belanja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya jika diarahkan pada sektor produktif seperti pendidikan dan infrastruktur.

Penelitian Fauziah & Ekaningtias (2022) menguji pengaruh Pertumbuhan Belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan data panel dari beberapa daerah dan model analisis regresi berganda, penelitian ini menemukan bahwa Pertumbuhan Belanja memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Studi ini juga menekankan bahwa efektivitas Pertumbuhan Belanja bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran.

Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian Pertumbuhan Belanja sebagai variabel bebas yang dihubungkan langsung dengan efektivitas anggaran belanja di tingkat kelurahan dalam periode 2021–2025, yang belum banyak dieksplorasi oleh studi terdahulu. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis deviasi antara target dan realisasi anggaran sebagai indikator kinerja belanja, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur manajemen keuangan publik pada level pemerintahan terkecil, sekaligus memberikan masukan praktis bagi optimalisasi pengelolaan anggaran daerah.

C. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

1. Weni Febriani et al. (2023), Santoso et al. (2024), Kuntadi & Dian Rosdiana (2022), Zulfaturrohman et al. (2021)
2. Sutono et al. (2022), Maspaitela et al. (2024), Safriansah et al. (2021), Llanas & Llanas (2024)
3. Ratnasari (2022), Annisa' Nur Fitriani & Nur Hayati (2024). Patty, (2019)
4. Bawimbang *et al.* (2021), Tarigan *et al.* (2023), Ernawati *et al.* (2021)
5. Nini *et al.* (2019), Oktaviani *et al.* (2021), Nirwana *et al.* (2023), Fauziyah & Ekaningtias (2022)

D. Pengembangan Hipotesa

1. Pengaruh ketepatan waktu penyerapan terhadap efektivitas anggaran belanja di Kelurahan Joyotakan

Ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan anggaran yang efektif. Penyerapan anggaran yang dilakukan secara tepat waktu menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan telah berjalan sesuai dengan jadwal dan target waktu yang telah ditentukan. Sebaliknya, keterlambatan dalam penyerapan dapat

menyebabkan tertundanya pelaksanaan program dan penurunan kualitas pelayanan publik. Menurut Santoso & Murtini (2021), penyerapan anggaran yang tidak tepat waktu berdampak negatif terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Penelitian Harlinah *et al.*, (2025) pada Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa efektivitas anggaran belanja dipengaruhi oleh ketepatan waktu penyerapan. Keterlambatan realisasi anggaran sampai pertengahan tahun hanya terealisasi sekitar sepertiga dari pagu, berakibat pada tertundanya pelaksanaan program dan kegiatan. menegaskan bahwa semakin tepat waktu serapan anggaran, hal ini menegaskan semakin tinggi pula efektivitas belanja pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: Ketepatan waktu penyerapan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja di Kelurahan Joyotakan.

2. Pengaruh tingkat serapan anggaran terhadap efektivitas anggaran belanja di Kelurahan Joyotakan

Tingkat Serapan Anggaran mencerminkan seberapa besar realisasi anggaran dibandingkan dengan total anggaran yang dialokasikan. Tingkat serapan yang tinggi menunjukkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan perencanaan, sehingga potensi peningkatan efektivitas anggaran lebih besar. Penelitian oleh Harimurti & Suranta (2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat penyerapan anggaran dengan efektivitas program pemerintah daerah. Serapan anggaran yang rendah mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan atau ketidakefisienan dalam manajemen anggaran. Penelitian Arniwita *et al.*, (2019) pada Pemerintah Provinsi Jambi menemukan bahwa serapan anggaran belanja oleh SKPD memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi, suatu indikator efektivitas belanja. Maka, hipotesis kedua adalah:

H2: Tingkat serapan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja di Kelurahan Joyotakan.

3. Pengaruh Deviasi Realisasi Target Anggaran terhadap efektivitas anggaran belanja di Kelurahan Joyotakan

Deviasi anggaran merupakan selisih antara target anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi anggaran yang terealisasi. Deviasi yang besar menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang bisa disebabkan oleh ketidakakuratan perencanaan, perubahan prioritas, atau hambatan pelaksanaan. Menurut studi dari Handayani & Prasetyo (2019), deviasi yang tinggi dalam pelaksanaan anggaran berdampak negatif terhadap efektivitas karena program tidak berjalan sesuai target. Studi Kuncoro (2008) pada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, ditemukan bahwa variansi anggaran yang telah diubah atau disesuaikan (APBD-P) menunjukkan pengaruh positif terhadap efektivitas penyerapan anggaran, dan mengindikasikan bahwa menyusutkan kesenjangan antara anggaran dan realisasi (mengurangi deviasi) dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Deviasi realisasi target anggaran tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja di Kelurahan Joyotakan.

4. Pengaruh Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat terhadap efektivitas anggaran belanja di Kelurahan Joyotakan

Belanja langsung kepada masyarakat, seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur lokal, secara langsung mempengaruhi manfaat yang diterima oleh warga. Proporsi belanja langsung yang tinggi menunjukkan komitmen pemerintah kelurahan dalam menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Menurut Rahmawati & Wicaksono (2021), alokasi belanja yang proporsional pada sektor langsung berkontribusi terhadap meningkatnya efektivitas anggaran karena program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran. Penelitian di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya menemukan bahwa efektivitas belanja langsung lebih mudah diukur karena

dampaknya yang langsung terasa dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat (Wambrauw *et al.*, 2025). Dengan demikian, hipotesis keempat adalah:

H4: Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja di Kelurahan Joyotakan.

5. Pengaruh Pertumbuhan Belanja terhadap efektivitas anggaran belanja di Kelurahan Joyotakan

Pertumbuhan Belanja dari tahun ke tahun menggambarkan adanya peningkatan kebutuhan layanan publik atau pengembangan program kerja yang semakin luas. Pertumbuhan Belanja yang direncanakan dan direalisasikan secara efisien dapat meningkatkan output dan outcome dari anggaran, sehingga memperkuat efektivitasnya. Hasil penelitian Muafiq & Chariri (2023) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Belanja memiliki hubungan yang signifikan dengan efektivitas anggaran belanja, di mana peningkatan belanja daerah yang terarah pada program produktif mampu meningkatkan optimalisasi serapan anggaran. Pertumbuhan Belanja yang konsisten dianggap sebagai indikator kapasitas pemerintah dalam merencanakan dan mengeksekusi anggaran secara tepat, sehingga berimplikasi pada meningkatnya efektivitas pencapaian target pembangunan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Maka, hipotesis kelima adalah:

H5: Pertumbuhan Belanja berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja di Kelurahan Joyotakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan data sekunder, pengambilan populasi dengan teknik *purpose sampling* dan dianalisis dengan metode analisis regresi linier berganda.

Menurut Sugiyono (2018: 14), Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari dokumen dan laporan keuangan tahun 2021 – 2025 dari Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Data tersebut meliputi

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Laporan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (ROPAK);
- c. Laporan Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK);
- d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Waktu yang dilakukan untuk penelitian adalah selama 3 bulan yang dimulai dari pengambilan data sampai pada tahap kesimpulan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 laporan bulanan realisasi keuangan pada Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta periode tahun 2021 – 2025.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen laporan keuangan bulanan Kelurahan Joyotakan periode tahun 2021–2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang bersumber dari laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan resmi kelurahan.

B. Variabel Data

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018: 38)

1. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas anggaran, merupakan salah satu tolak ukur yang ditetapkan oleh instansi pemerintah akan sasaran yang diprogramkan atau ditargetkan dapat tercapai atau tidak (Kusuma & Budiwitjaksono, 2023), cara pengukurannya sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Realisasi Anggaran Belanja diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Target Anggaran Belanja diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

2. Variabel Independen (Bebas)

a. Ketepatan Waktu Penyerapan Anggaran

Ketepatan waktu penyerapan anggaran merupakan persentase realisasi anggaran triwulanan yang telah dibelanjakan paling lambat 10 hari kerja setelah akhir triwulan. Data diambil dari tabel realisasi per triwulan pada Laporan Pengendalian atau Laporan Pelaksanaan Operasional Kegiatan (Santoso et al., 2024). Cara pengukurannya sebagai berikut:

$$\text{Ketepatan Waktu Penyerapan} = \frac{\text{Realisasi (on time)}}{\text{Target Triwulan}} \times 100\%$$

b. Tingkat Serapan Anggaran

Tingkat Serapan Anggaran merupakan rasio seluruh realisasi belanja terhadap pagu anggaran kelurahan pada akhir tahun. Mencerminkan seberapa besar pagu dihabiskan, yang bersumber dari DPA dan LRA (Sutono *et al.*, 2022). Cara pengukurannya sebagai berikut:

$$\text{Serapan Anggaran} = \frac{\text{Total realisasi}}{\text{Total Pagu}} \times 100\%$$

c. Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran

Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran merupakan selisih proporsional antara target penyerapan (triwulanan/tahunan) dan realisasi aktual. Data bersumber dari DPA dan LRA (Ratnasari, 2022). Cara pengukurannya sebagai berikut:

$$\text{Deviasi} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

d. Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat

Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat merupakan persentase belanja subkegiatan pada DPA yang langsung menyasar masyarakat (pemberdayaan, bantuan sosial, hibah) terhadap total realisasi belanja kelurahan (Tarigan *et al.*, 2023). Cara pengukurannya sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Belanja Langsung} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung Masyarakat}}{\text{Total Realisasi}} \times 100\%$$

e. Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan Belanja merupakan laju perubahan nominal realisasi belanja total dari tahun t-1 ke tahun t, yang bersumber dari data LRA (Nirwana & Trisuswanto, 2023). Cara perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi}_t - \text{Realisasi}_{t-1}}{\text{Realisasi}_{t-1}} \times 100\%$$

C. Teknik Analisa Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2018: 147) Analisis Statistik Deskriptif adalah statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Berdasarkan jurnal dari Slater & Felicity Hasson (2025), Statistik deskriptif berperan sebagai langkah awal dalam *quality-check* data dan sebagai alat untuk memvisualisasikan pola/tren data penelitian sebelum analisis inferensial dan sesuai untuk memperkuat fungsi statistik deskriptif

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan metode Kolmogorov–Smirnov Test dengan bantuan program IBM SPSS. Menurut (Ghozali, 2018: 161), pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed), yaitu:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka residual berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka residual tidak berdistribusi normal.

Selain itu, normalitas dapat dilihat melalui grafik Normal P–P Plot of Regression Standardized Residual. Menurut (Ghozali, 2018: 163), model regresi memenuhi asumsi normalitas apabila titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sebaliknya, apabila titik-titik data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018: 107), pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan tidak mengalami multikolinieritas apabila memiliki nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 . Sebaliknya, apabila nilai Tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka model regresi tersebut menunjukkan adanya multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi terdapat kesamaan jawaban responden satu dengan responden yang lain. Mengetahui ada tidaknya *heterokedastisitas* suatu model dapat dilihat pada gambar *Scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas jika titik titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0. Bisa juga menggunakan uji Glejser, jika variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen maka terjadi *heterokedastisitas* dan jika signifikan diatas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terjadi *heterokedastisitas* (Ghozali, 2018: 137)

d. Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi bertujuan menguji apakah data model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (Ghozali, 2018:112). Hal ini mempunyai arti bahwa hasil suatu tahun tertentu dipengaruhi tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Terdapat korelasi atas data *cross sectional* apabila data di suatu tempat atau mempengaruhi tempat yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Kriteria dalam uji ini adalah :

- 1) Apabila $d_{hitung} < d_L$ atau $d_{hitung} > (4-d_u)$, maka terjadi autokorelasi;
- 2) Apabila $d_U < d_{hitung} < (4-d_u)$, maka tidak terjadi autokorelasi;

- 3) Apabila $d_L < d_{hitung} < d_U$ atau $(4-d_U) < d_{hitung} < (4-d_L)$, maka inkonklusif atau ragu ragu.

3. Uji Regresi Linear Berganda

a. Model Regresi

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta untuk memperkirakan perubahan pada variabel dependen berdasarkan perubahan variabel independen dalam model linear (Rahman et al., 2022). Analisis regresi linear dibedakan menjadi regresi linear sederhana dan regresi linear berganda.

Rahman et al., (2022: 128) menjelaskan bahwa regresi linear sederhana merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengukur hubungan dan pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Melalui model linear, peneliti dapat mengetahui besarnya pengaruh variabel independen sekaligus memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan pada variabel independen. Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pola variabel terikat dapat diprediksikan melalui variabel bebas. Pada regresi linear berganda bertujuan untuk menduga besarnya koefisien regresi dan menunjukkan besarnya pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018: 95). Model persamaan regresi yang digunakan ialah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \text{ (Ghozali, 2018: 86)}$$

Keterangan:

Y : Variabel Efektivitas Anggaran

X₁ : Variabel Ketepatan Waktu Penyerapan Anggaran

X₂ : Variabel Tingkat Serapan Anggaran

X₃ : Variabel Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran

X₄ : Variabel Proporsi belanja Langsung ke Masyarakat

X₅ : Variabel Pertumbuhan Belanja

- a : konstanta
 b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 : koefisien korelasi
 e : *error term* kesalahan pengganggu

b. Uji Kelayakan Model

Uji F adalah pengujian signifikan yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama sama terhadap variabel terikat. Apabila hasil dari uji F memiliki angka $\text{sig} < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh secara stimulan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018: 303). Langkah – langkah pengujian sebagai berikut:

- 1) Menentukan formulasi H_0 dan H_a
 - a) Jika $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = 0$; Berarti tidak ada pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.
 - b) Jika $H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 \neq 0$; Berarti terdapat pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.
- 2) Menentukan level of significance
 $\alpha = 0,05$ atau 5%
 $F_{\alpha; k-1; (n-k)}$
- 3) Kriteria pengujian
 - a) Jika $F_{\text{hit}} \leq F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
 - b) Jika $F_{\text{hit}} \geq F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 4) Pengujian nilai F

$$F_{\text{hitung}} = \frac{JKR/k}{JKS/(n-k-1)}$$

Keterangan :

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKS : Jumlah Kuadrat Sisa

N : Jumlah sampel

k : Banyaknya variabel bebas

5) Keputusan

H_0 diterima jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan sebaliknya H_0 ditolak jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$

c. Uji Hipotesa

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial, digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018: 304). Apabila hasil uji t dengan signifikan $< 0,05$, berarti variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Langkah – langkah pengujiannya sebagai berikut:

1) Menyusun formulasi H_0 dan H_a

- a) Jika $H_0 : b = 0$, artinya variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan;
- b) Jika $H_0 : b \neq 0$, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan.

2) Menentukan level of significance $\alpha = 0,05$ atau 5%

3) Kriteria Pengujian

H_0 diterima jika : $-t(\alpha/2, n-1) \leq t_{hitung} \leq t(\alpha/2, n-1)$

H_0 ditolak jika : $t_{hitung} \leq -t(\alpha/2, n-1)$ atau $t_{hitung} \geq t(\alpha/2, n-1)$

4) Menentukan nilai t_{hitung}

$$t_{hitung} = \frac{b}{S_b}$$

Keterangan :

b : Parameter estimasi

S_b : Standart Error

5) Keputusan

H_0 diterima jika nilai t_{hitung} terletak antara $-t(\alpha/2, n-1)$ dan $t(\alpha/2, n-1)$, sebaliknya H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} \leq -t(\alpha/2, n-1)$ atau $t_{hitung} \geq t(\alpha/2, n-1)$

d. Uji Koefisien Determinasi/ R²

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sumbangan atau seberapa besar pengaruhnya variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018: 97). Nilai koefisien determinasi yaitu nol sampai satu. Semakin besar *adjusted R square* maka sumbangan perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas akan semakin tinggi. Apabila *adjusted R square* semakin kecil, maka sumbangan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas akan semakin rendah. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$R^2 = ESS / TSS = 1 - (RSS / TSS)$$

Keterangan :

ESS : *Explain Sum of Square* (Jumlah Kuadrat dari Regresi)

TSS : *Total Sum of Square* (Total Jumlah Kuadrat)

RSS : *Residual Sum of Square* (Jumlah Kuadrat Kesalahan Pengganggu)

Nilai RSS tergantung pada banyaknya variabel bebas yang terdapat dalam model. Semakin banyak variabel bebas, maka nilai RSS semakin menurun sehingga nilai R² akan meningkat. Maka sering digunakan nilai R² yang telah disesuaikan derajat kebebasannya. Hubungan R² dengan R² yang disesuaikan dapat ditulis sebagai berikut:

$$R^2_{adj} = \frac{1 - (1 - R^2) \frac{N - 1}{N - k}}{1}$$

Keterangan :

N : Jumlah Observasi

K : Jumlah Variabel Bebas

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran bulanan periode tahun 2021 hingga 2025. Kelurahan Joyotakan merupakan salah satu kelurahan yang berada dalam lingkup pemerintahan Kota Surakarta dengan karakteristik kawasan urban yang padat penduduk, serta memiliki kompleksitas pelayanan publik yang cukup tinggi. Sebagai unit pemerintahan terdepan dalam melayani masyarakat, Kelurahan Joyotakan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pemerintah Kota Surakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun setiap tahun anggaran.

Objek penelitian ini adalah efektivitas anggaran belanja kelurahan yang diukur melalui rasio realisasi anggaran terhadap target pagu anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan bulanan realisasi keuangan Kelurahan Joyotakan periode 2021–2025, yaitu sebanyak 60 laporan bulanan.

Efektivitas anggaran Kelurahan Joyotakan dari sisi tren temporal selama periode penelitian menunjukkan pola fluktuatif yang menarik untuk dikaji. Pada tahun 2021 rata-rata efektivitas anggaran mencapai 83,29% (tertinggi sepanjang periode penelitian) yang mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang relatif baik pada tahun pertama. Namun demikian, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan signifikan masing-masing menjadi 60,69% dan 60,58%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh tantangan pasca-pandemi terhadap kapasitas perencanaan dan pengadaan barang/jasa. Tahun 2024 mencatat efektivitas terendah sebesar 57,69%, sebelum mengalami pemulihan pada tahun 2025 menjadi 73,18%. Pola fluktuatif ini mengindikasikan bahwa efektivitas anggaran belanja kelurahan dipengaruhi oleh berbagai determinan

yang perlu dikaji secara empiris, sebagaimana menjadi tujuan utama penelitian ini.

Tabel 4.1. Rata-Rata Kinerja Variabel Penelitian per Tahun Anggaran

Tahun	Ef. Anggaran Y (%)	Ketepatan Waktu X ₁ (%)	Serapan X ₂ (%)	Deviasi X ₃ (%)	Belanja Langsung X ₄ (%)	Pertumbuhan X ₅ (%)
2021	83,29	86,28	28,90	8,38	6,89	38,18
2022	60,69	87,94	35,00	39,31	1,58	29,09
2023	60,58	- 42,38	39,63	4,54	2,97	30,48
2024	57,69	90,55	34,68	42,31	1,22	22,71
2025	73,18	114,62	37,16	26,82	1,34	25,77
Rata-rata	67,09	67,40	35,07	24,27	2,80	29,25

*) Rata-rata X₁ tahun 2023 bernilai negatif karena terdapat observasi dengan nilai ekstrem (outlier) pada bulan November 2023

Sumber : Hasil Analisis Deskriptif, Lampiran 2

B. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik distribusi data setiap variabel penelitian sebelum dilanjutkan ke tahap analisis inferensial. Menurut Sugiyono (2018: 147), statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Statistik deskriptif berperan sebagai langkah awal dalam quality-check data dan memvisualisasikan pola atau tren data penelitian sebelum analisis inferensial dilaksanakan (Slater & Hasson, 2025). Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Y (Efektivitas Anggaran, %)	60	0,00	106,04	67,09	27,99
X1 (Ketepatan Waktu, %)	60	-1.689,83	459,48	67,40	242,46
X2 (Tingkat Serapan, %)	60	0,00	96,44	35,07	29,40
X3 (Deviasi Realisasi, %)	60	-34,96	70,74	24,27	27,89
X4 (Proporsi Belanja Langsung, %)	60	0,00	16,43	2,80	4,28
X5 (Pertumbuhan Belanja, %)	60	-100,00	203,03	29,25	55,12

Sumber : Hasil Analisis Deskriptif, Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dideskripsikan hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

Variabel efektivitas anggaran memiliki nilai minimum sebesar 0% dan nilai maksimum sebesar 106,04% dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 67,09% dan standar deviasi sebesar 27,99%. Nilai rata-rata efektivitas anggaran yang belum mencapai 100% mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, realisasi anggaran belanja Kelurahan Joyotakan selama periode 2021–2025 masih belum optimal jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan. Standar deviasi sebesar 27,99% menunjukkan adanya variasi data yang relatif tinggi antar periode pengamatan (Setyorini et al., 2024)

Variabel ketepatan waktu penyerapan anggaran menunjukkan nilai minimum sebesar -1.689,83% dan nilai maksimum sebesar 459,48% dengan rata-rata sebesar 67,40% dan standar deviasi 242,46%. Nilai standar deviasi yang sangat besar ini mengindikasikan adanya fluktuasi ekstrem dalam ketepatan waktu penyerapan anggaran antar periode, yang kemungkinan disebabkan oleh pola penyerapan yang tidak merata.

Variabel tingkat serapan anggaran memiliki nilai minimum 0% dan maksimum 96,44% dengan rata-rata 35,07% serta standar deviasi 29,40%. Tingkat serapan kumulatif yang rata-rata masih berada di sekitar 35,07% mencerminkan pola serapan yang belum merata sepanjang tahun anggaran,

sejalan dengan temuan Safriansah et al. (2021) yang menyatakan bahwa sebagian besar pemerintah daerah cenderung menyerap anggaran secara akselerasi pada triwulan akhir.

Variabel Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran menunjukkan nilai minimum -34,96% (over-realisasi) dan maksimum 100,00% dengan rata-rata 24,27% dan standar deviasi 27,89%. Rata-rata deviasi yang positif menandakan bahwa secara umum realisasi anggaran masih berada di bawah target yang ditetapkan. Hal ini konsisten dengan temuan Ratnasari (2022) yang menyebutkan bahwa ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dan pelaksanaan kegiatan merupakan penyebab utama deviasi anggaran.

Variabel Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat memiliki nilai minimum 0,00% dan maksimum 16,43% dengan rata-rata 2,80% dan standar deviasi 4,28%. Nilai rata-rata yang relatif rendah mengindikasikan bahwa proporsi belanja yang secara langsung menyalurkan masyarakat (pemberdayaan, bantuan sosial, hibah) masih terbatas dalam struktur anggaran kelurahan.

Variabel Pertumbuhan Belanja memiliki nilai minimum -100% dan maksimum 203,03% dengan rata-rata 29,25% dan standar deviasi 55,12%. Nilai maksimum yang sangat tinggi mencerminkan adanya periode tertentu yang mengalami lonjakan belanja signifikan, sementara standar deviasi yang besar menunjukkan heterogenitas Pertumbuhan Belanja antar periode pengamatan.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu perlu dipastikan bahwa model memenuhi asumsi klasik Gauss-Markov agar estimator yang dihasilkan bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) (Fauzi, 2022). Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai residual berdistribusi normal (Ghozali, 2018: 161). Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) terhadap residual model regresi. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai probabilitas (Asymp. Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas

	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,098	60	,200*

Sumber : Hasil Uji Asumsi Klasik, Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil uji Kolmogorov-Smirnov terhadap residual model regresi menunjukkan nilai statistik K-S sebesar 0,098 dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat kritis = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Pemenuhan asumsi normalitas residual ini membuktikan bahwa estimasi parameter regresi dapat dipercaya dan reliabel (Ghozali, 2018: 161).

Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan analisis regresi linear berganda dapat dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

b. Uji Multikolinearitas

uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen dalam model regresi. Keberadaan korelasi yang tinggi dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi kurang stabil sehingga model yang baik diharapkan bebas dari gejala multikolinearitas (Ghozali, 2018: 107). Deteksi multikolinearitas dilakukan melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Kriteria bebas multikolinearitas adalah nilai

Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
X1 – Ketepatan Waktu Penyerapan	0,975	1,026	Bebas Multikolinearitas
X2 – Tingkat Serapan Anggaran	0,718	1,393	Bebas Multikolinearitas
X3 – Deviasi Realisasi Target	0,662	1,511	Bebas Multikolinearitas
X4 – Proporsi Belanja Langsung	0,728	1,374	Bebas Multikolinearitas
X5 – Pertumbuhan Belanja	0,783	1,277	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Hasil Uji Asumsi Klasik, Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.4, seluruh variabel independen menunjukkan nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Ketepatan waktu penyerapan anggaran (X1) memiliki Tolerance 0,975 dan VIF 1,026; Tingkat serapan anggaran (X2) memiliki Tolerance 0,718 dan VIF 1,393; Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran (X3) memiliki Tolerance 0,662 dan VIF 1,511; Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat (X4) memiliki Tolerance 0,728 dan VIF 1,374; serta Pertumbuhan Belanja (X5) memiliki Tolerance 0,783 dan VIF 1,277.

Nilai VIF seluruh variabel jauh di bawah ambang batas 10 dan Tolerance jauh di atas 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas (Ghozali, 2018: 108). Asumsi bebas multikolinearitas terpenuhi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018: 169). Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap masing-masing variabel independen. Apabila nilai signifikansi variabel independen > 0,05 terhadap nilai absolut residual, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas (homoskedastis). Hasil uji Glejser disajikan pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel	Koefisien	Sig.	Kesimpulan
X1 – Ketepatan Waktu Penyerapan	1,584	0,137	Tidak terjadi Heteroskedastis
X2 – Tingkat Serapan Anggaran	0,062	0,951	Tidak terjadi Heteroskedastis
X3 – Deviasi Realisasi Target	0,167	0,870	Tidak terjadi Heteroskedastis
X4 – Proporsi Belanja Langsung	-0,060	0,953	Tidak terjadi Heteroskedastis
X5 – Pertumbuhan Belanja	-0,216	0,832	Tidak terjadi Heteroskedastis

Sumber : Hasil Uji Asumsi Klasik, Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.5, Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Hasil uji Glejser terhadap nilai absolut residual menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pun variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Nilai signifikansi (Sig.) untuk ketepatan waktu penyerapan anggaran sebesar 0,137; Tingkat serapan anggaran sebesar 0,951; Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran sebesar 0,870; Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat sebesar 0,953; dan Pertumbuhan Belanja sebesar 0,832.

Seluruh nilai signifikansi tersebut berada di atas $\alpha = 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Hasil ini juga didukung oleh grafik Scatterplot yang menunjukkan titik-titik residual tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu. Asumsi homoskedastisitas dalam model regresi penelitian ini terpenuhi (Ghozali, 2018: 138).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (Ghozali, 2018: 107). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan statistik Durbin-Watson (DW), model dikatakan bebas autokorelasi secara lebih spesifik apabila nilai DW berada di antara batas atas (dU) dan $(4 - dU)$ (Septian, 2025). Hasil uji autokorelasi disajikan pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Keterangan	Nilai
N	60
Jumlah variabel bebas (k)	5
Durbin-Watson (DW)	1,632
Kesimpulan	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber : Hasil Uji Asumsi Klasik, Lampiran 3

Berdasarkan tabel Durbin-Watson dengan jumlah sampel (n) dan jumlah variabel independen (k), diperoleh nilai dU sebesar 1,767. Berdasarkan Tabel 4.6, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,632. Pengujian autokorelasi menggunakan kriteria Durbin-Watson dengan $n = 60$ dan $k = 5$ variabel independen pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ menghasilkan nilai batas bawah (dL) = 1,408 dan batas atas (dU) = 1,767, dan perhitungan nilai untuk $4-dU = 2,233$ dan $4-dL = 2,592$. Nilai DW sebesar 1,632 berada di antara dL (1,408) dan dU (1,767) yang merupakan zona tidak terdapat autokorelasi positif. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi yang serius.

Analisi berdasarkan pendekatan praktis (*Rule of Thumb*) nilai Durbin-Watson sebesar 1,632 berada pada rentang 1,5–2,5, maka model regresi tidak mengalami autokorelasi, sehingga asumsi bebas

autokorelasi dalam model regresi penelitian ini dapat dinyatakan terpenuhi, sehingga seluruh asumsi klasik telah dipenuhi dan analisis regresi linear berganda dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2018: 111).

3. Uji Regresi Linear Berganda

a. Model Regresi

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama maupun parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 95). Hasil pengolahan data realisasi anggaran Kelurahan Joyotakan tahun 2021–2025, diperoleh output tabel Coefficients sebagaimana disajikan pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda – Coefficients

Model	B (Unstandardized)	Std. Error	Beta (Standardized)	t	Sig.
(Constant)	47,188	5,396		8,745	,000
X1 – Ketepatan Waktu	,003	,009	,023	,298	,767
X2 – Tingkat Serapan	,410	,087	,431	4,718	,000
X3 – Deviasi Realisasi	-,188	,095	-,187	-1,972	,054
X4 – Proporsi Belanja Langsung	1,700	,593	,260	2,867	,006
X5 – Pertumbuhan Belanja	,176	,044	,346	3,960	,000

Sumber : Hasil Uji Regresi Linear Berganda, Lampiran 4

Persamaan model regresi yang diestimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 47,188 + 0,003X_1 + 0,410X_2 - 0,188X_3 + 1,700X_4 + 0,176X_5 + e$$

Interpretasi dari masing-masing koefisien regresi adalah sebagai berikut:

1) Konstanta ($a = 47,188$)

Nilai konstanta sebesar 47,188 mengandung makna bahwa apabila seluruh variabel independen (Ketepatan waktu penyerapan anggaran, Tingkat serapan anggaran, Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran, Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat, dan Pertumbuhan Belanja) bernilai nol, maka efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan secara rata-rata adalah sebesar 47,188%. Nilai konstanta positif ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat efektivitas dasar yang melekat pada sistem pengelolaan anggaran kelurahan terlepas dari pengaruh kelima variabel independen yang diteliti.

2) Ketepatan Waktu Penyerapan Anggaran

Koefisien regresi variabel ketepatan waktu penyerapan anggaran sebesar 0,003 yang bersifat positif, artinya setiap peningkatan satu persen ketepatan waktu penyerapan anggaran akan meningkatkan Efektivitas Anggaran sebesar 0,003%, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien ini bernilai kecil, mengindikasikan kontribusi variabel ini terhadap efektivitas anggaran terbatas. Nilai *standardized coefficient* (Beta) sebesar 0,023 memperlihatkan pengaruh yang lemah secara relatif dibandingkan variabel independen lainnya.

3) Tingkat Serapan Anggaran

Koefisien regresi variabel tingkat serapan anggaran sebesar 0,410 yang bersifat positif, artinya setiap peningkatan satu persen tingkat serapan anggaran akan meningkatkan Efektivitas Anggaran sebesar 0,410%, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien ini merupakan yang terbesar kedua dalam model, menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan anggaran secara kumulatif berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. Nilai *standardized coefficient* (Beta) sebesar 0,431 menunjukkan variabel ini merupakan prediktor dominan pertama dalam model.

4) Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran

Variabel Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran memiliki koefisien regresi sebesar -0,188 yang bersifat negatif, artinya setiap peningkatan satu persen Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran akan menurunkan Efektivitas Anggaran sebesar 0,188%, dengan asumsi variabel lain konstan. Arah koefisien negatif ini konsisten dengan ekspektasi teoritis bahwa semakin besar penyimpangan antara realisasi dan target anggaran, semakin rendah efektivitas pelaksanaan anggaran. Nilai *standardized coefficient* (Beta) sebesar -0,187 mengindikasikan pengaruh negatif yang cukup berarti.

5) Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat

Koefisien regresi variabel Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat sebesar 1,700 yang bersifat positif, artinya setiap peningkatan satu persen Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat akan meningkatkan Efektivitas Anggaran sebesar 1,700%, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien ini merupakan yang terbesar dalam model dari sisi *unstandardized*, menandakan bahwa peningkatan alokasi belanja yang langsung menasar masyarakat memiliki dampak paling besar terhadap efektivitas anggaran per unit perubahan.

6) Pertumbuhan Belanja

Koefisien regresi variabel Pertumbuhan Belanja sebesar 0,176 yang bersifat positif, artinya setiap peningkatan satu persen Pertumbuhan Belanja akan meningkatkan Efektivitas Anggaran sebesar 0,176%, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien positif ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan anggaran yang berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan belanja kelurahan. Nilai *standardized coefficient* (Beta) sebesar 0,346 menunjukkan variabel ini merupakan prediktor yang cukup dominan dalam model.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F atau uji kelayakan model (*goodness of fit*) dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 98-99). Kriteria pengujian: apabila nilai sig. F < 0,05 maka model regresi dinyatakan layak (fit). Hasil uji F disajikan pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8. Hasil Uji Kelayakan Model (ANOVA)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	31292,969	5	6258,594	22,653	,000b
Residual	14919,092	54	276,279		
Total	46212,061	59			

Sumber : Hasil Uji Regresi Linear Berganda, Lampiran 4

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh nilai F hitung sebesar 22,653 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kritis $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Efektivitas Anggaran (Ghozali, 2018: 98).

Model regresi linear berganda yang dibangun dalam penelitian ini dinyatakan layak (fit) dan dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh ketepatan waktu penyerapan anggaran, tingkat serapan anggaran, Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran, Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat, dan Pertumbuhan Belanja terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan secara bersama-sama.

c. Uji Hipotesis

Tabel 4.9. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
H1: Pengaruh ketepatan waktu penyerapan anggaran terhadap Efektivitas Anggaran	,298	±2,001	,767	H ₁ Ditolak
H2: Pengaruh tingkat serapan anggaran terhadap Efektivitas Anggaran	4,718	±2,001	,000	H₂ Diterima
H3: Pengaruh Deviasi Realisasi Target Anggaran terhadap Efektivitas Anggaran	-1,972	±2,001	,054	H ₃ Ditolak
H4: Pengaruh Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat terhadap Efektivitas Anggaran	2,867	±2,001	,006	H₄ Diterima
H5: Pengaruh Pertumbuhan Belanja terhadap Efektivitas Anggaran	3,960	±2,001	,000	H₅ Diterima

Sumber : Hasil Uji Regresi Linear Berganda, Lampiran 4

Berdasarkan Tabel 4.9, interpretasi hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh ketepatan waktu penyerapan anggaran terhadap Efektivitas Anggaran

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa ketepatan waktu penyerapan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan. Berdasarkan hasil output SPSS 27 pada Tabel 4.3, diperoleh nilai t hitung untuk ketepatan waktu Penyerapan sebesar 0,298 dengan nilai signifikansi 0,767. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel ketepatan waktu penyerapan anggaran ditolak, yang berarti ketepatan waktu penyerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran di Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

2) Pengaruh tingkat serapan anggaran terhadap Efektivitas Anggaran

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian adalah tingkat serapan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan. Berdasarkan Tabel 4.9, diperoleh nilai t

hitung untuk tingkat serapan anggaran sebesar Hipotesis 2 menyatakan bahwa tingkat serapan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan. Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh nilai t hitung untuk tingkat serapan anggaran sebesar 4,718 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat serapan anggaran diterima, yang berarti tingkat serapan anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran di Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

3) Pengaruh Deviasi Realisasi Target Anggaran terhadap Efektivitas Anggaran

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian adalah deviasi realisasi target anggaran menghasilkan nilai t-hitung sebesar Variabel Deviasi Realisasi terhadap Target Anggaran menghasilkan nilai t-hitung sebesar -1,972 dengan nilai signifikansi 0,054. Nilai signifikansi 0,054 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel deviasi realisasi target anggaran ditolak, yang berarti deviasi realisasi target anggaran tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran di Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

4) Pengaruh Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat terhadap Efektivitas Anggaran

Hipotesis 4 yang diajukan dalam penelitian adalah proporsi belanja langsung kepada masyarakat menghasilkan nilai t-hitung sebesar Variabel Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat menghasilkan nilai t-hitung sebesar 2,867 dengan nilai signifikansi 0,006. Nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi belanja langsung kepada masyarakat diterima, yang berarti proporsi belanja langsung kepada masyarakat berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran di Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

5) Pengaruh Pertumbuhan Belanja terhadap Efektivitas Anggaran

Hipotesis 5 yang diajukan dalam penelitian adalah pertumbuhan belanja menghasilkan nilai t-hitung sebesar 3,960 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan belanja diterima, yang berarti pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran di Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018: 97). Adjusted R^2 digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dengan mempertimbangkan jumlah variabel bebas dalam model. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
R	,823 ^a
R Square (R^2)	,677
Adjusted R Square	,647
Std. Error of the Estimate	16,62166

Sumber : Hasil Uji Regresi Linear Berganda, Lampiran 4

Berdasarkan Tabel 4.10, diperoleh nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,823. Nilai R Square (R^2) sebesar 0,677 mengindikasikan bahwa 67,7% variasi efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh kelima variabel independen dalam model, yaitu ketepatan waktu penyerapan anggaran, tingkat serapan anggaran, Deviasi Realisasi terhadap Target

Anggaran, Proporsi Belanja Langsung kepada Masyarakat, dan Pertumbuhan Belanja.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,647 digunakan sebagai ukuran *goodness of fit* yang lebih tepat karena telah memperhitungkan jumlah variabel prediktor dalam model. Nilai Adjusted R² sebesar 64,7% menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi efektivitas anggaran cukup baik. Sisanya sebesar 35,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini (Ghozali, 2018: 97-98).

C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji setiap ketepatan waktu penyerapan anggaran, tingkat serapan anggaran, deviasi realisasi terhadap target anggaran, proporsi belanja langsung kepada masyarakat dan pertumbuhan belanja. Berdasarkan hasil pengujian empiris terhadap beberapa variabel yang diajukan dalam penelitian ini. Tidak semua variabel independen mempunyai variabel dependen.

1. Pengaruh ketepatan waktu penyerapan anggaran terhadap Efektivitas Anggaran

Hasil pengujian seperti tersaji pada Tabel 4.9, menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan. Pengaruh ketepatan waktu penyerapan anggaran tidak signifikan dapat disebabkan oleh karakteristik data anggaran bulanan kelurahan yang menunjukkan pola penyerapan yang sangat berfluktuasi dengan standar deviasi yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa pola penyerapan anggaran bulanan di tingkat kelurahan tidak selalu mencerminkan ketepatan perencanaan, melainkan lebih dipengaruhi oleh ketersediaan dana dari pemerintah kota dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan atasan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Santoso et al., (2024) yang menemukan bahwa faktor keterlambatan administrasi dan minimnya

monitoring real-time menyebabkan variabel ketepatan waktu penyerapan tidak selalu berdampak signifikan terhadap efektivitas anggaran. Keterbatasan kewenangan kelurahan sebagai unit pelaksana yang sangat bergantung pada kebijakan kota di atasnya menjadikan variabel ketepatan waktu kurang memiliki kekuatan prediksi terhadap efektivitas anggaran.

Pola yang sama tersebut mengindikasikan bahwa pada unit pelaksana dengan kewenangan yang terbatas seperti Kelurahan, faktor ketepatan waktu penyerapan cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi eksternal, seperti ketersediaan dana dari pemerintah di atasnya dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, dibandingkan oleh kualitas perencanaan internal semata. Kewenangan Kelurahan Joyotakan sebagai unit pelaksana yang sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah Kota Surakarta semakin memperkuat argumen bahwa variabel ketepatan waktu kurang memiliki kekuatan prediksi terhadap efektivitas anggaran.

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati et al., (2024) dan Safriansah et al., (2021), yang masing-masing menemukan bahwa penyerapan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dan kinerja keuangan instansi. Perbedaan ini diduga bersumber dari karakteristik objek penelitian yang berbeda: kedua penelitian tersebut dilakukan pada instansi dengan skala pengelolaan anggaran yang lebih besar (badan perencanaan provinsi dan balai kementerian/lembaga) serta memiliki otonomi pengambilan keputusan dan kapasitas kelembagaan yang lebih tinggi, sehingga penyerapan anggaran yang tepat waktu lebih mampu mencerminkan kualitas perencanaan dan pengendalian internal mereka. Sebaliknya, kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki keterbatasan kewenangan fiskal dan sangat bergantung pada kebijakan serta jadwal pencairan dana dari pemerintah kota, sehingga variasi ketepatan waktu penyerapan anggaran tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran di tingkat kelurahan.

2. Pengaruh tingkat serapan anggaran terhadap efektivitas anggaran

Hasil pengujian seperti tersaji pada Tabel 4.9, menunjukkan bahwa tingkat serapan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penyerapan anggaran kumulatif bulanan, semakin tinggi pula efektivitas anggaran yang dicapai. Tingkat serapan yang tinggi mencerminkan bahwa program dan kegiatan kelurahan benar-benar direalisasikan sesuai rencana, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran publik. Standar koefisien menunjukkan bahwa variabel ini merupakan prediktor terkuat pertama dalam model.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Safriansah et al., (2021) yang membuktikan bahwa penyerapan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penelitian Llanas & Llanas, (2024) juga menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan anggaran (*budget utilization rate*) berkorelasi positif signifikan dengan kinerja pelaksanaan program. Semakin tinggi realisasi penyerapan anggaran, semakin efektif penggunaan dana publik dalam mencapai target yang ditetapkan (Mahmudi, 2019).

3. Pengaruh deviasi realisasi terhadap target anggaran terhadap efektivitas anggaran

Hasil pengujian seperti tersaji pada Tabel 4.9, menunjukkan bahwa deviasi realisasi terhadap target anggaran tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar deviasi, semakin rendah efektivitas anggaran. Hal ini sesuai dengan logika teori bahwa akurasi perencanaan anggaran merupakan penentu faktor penentu kualitas realisasi belanja.

Temuan ini didukung oleh penelitian Ratnasari (2022) yang menemukan bahwa deviasi anggaran disebabkan oleh perencanaan yang kurang optimal dan koordinasi internal yang lemah. Penelitian Patty (2019) membuktikan bahwa kesalahan prakiraan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap deviasi anggaran. Kondisi ini memperkuat pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran untuk meminimalkan deviasi

dan meningkatkan efektivitas belanja kelurahan (Rahayuningsih & Syaflan, 2024).

4. Pengaruh proporsi belanja langsung kepada masyarakat terhadap efektivitas anggaran

Hasil pengujian seperti tersaji pada Tabel 4.9, menunjukkan bahwa proporsi belanja langsung kepada masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi belanja yang langsung menyasar masyarakat memberikan dampak yang relatif besar terhadap efektivitas anggaran. Belanja langsung yang tepat sasaran mencerminkan kualitas alokasi anggaran yang mampu mewujudkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara nyata. Hal ini sejalan dengan konsep *performance based budgeting* yang menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan output dan outcome yang dapat dirasakan masyarakat.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Tarigan et al., (2023) yang menemukan bahwa pemanfaatan belanja langsung dalam penganggaran berbasis kinerja mencerminkan efektivitas pencapaian target program pemerintah. Rahmawati & Wicaksono (2021) juga membuktikan bahwa proporsi belanja langsung berpengaruh positif terhadap efektivitas anggaran daerah. Penelitian Ernawati et al., (2021) menunjukkan bahwa alokasi dana yang langsung menyasar masyarakat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, yang mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran.

5. Pengaruh pertumbuhan belanja terhadap efektivitas anggaran

Hasil pengujian seperti tersaji pada Tabel 4.9, menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan anggaran belanja yang berkelanjutan berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. Nilai *standardized coefficient* menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja merupakan prediktor dominan kedua setelah tingkat serapan anggaran. Pertumbuhan belanja yang positif

mencerminkan komitmen pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kapasitas pelayanan publik secara bertahap dan terencana.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauziyah & Ekaningtias, (2022) yang membuktikan bahwa pertumbuhan belanja berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nirwana & Trisuswanto (2023) menemukan bahwa pertumbuhan belanja yang seimbang dan efisien mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Meskipun demikian, pertumbuhan belanja yang berlebihan tanpa disertai perencanaan yang baik justru dapat menimbulkan inefisiensi, sebagaimana ditegaskan oleh Alifah et al. (2023).

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil dan pengembangan penelitian di masa mendatang.

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup satu kelurahan, yaitu Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Keterbatasan cakupan geografis ini menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara langsung untuk kelurahan lain atau wilayah yang memiliki karakteristik kelembagaan, fiskal, dan sosial yang berbeda.
2. Unit analisis penelitian ini adalah data bulanan selama lima tahun anggaran (2021–2025) dengan jumlah observasi sebanyak 60 bulan. Jumlah observasi yang relatif terbatas dapat memengaruhi kekuatan statistik (*statistical power*) pengujian hipotesis, sehingga beberapa variabel yang secara teoritis berpengaruh mungkin tidak terdeteksi signifikan dalam model.
3. Variabel-variabel yang dimasukkan dalam model hanya mencakup lima indikator kuantitatif yang terukur dari dokumen realisasi anggaran. Faktor-faktor kualitatif yang berpengaruh terhadap efektivitas anggaran, seperti kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan, koordinasi antarunit, sistem pengendalian internal, dan komitmen pimpinan, tidak dimasukkan dalam model sehingga nilai Adjusted R² masih menyisakan 35,3% yang tidak dapat dijelaskan.

4. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen DPA dan LRA resmi Kelurahan Joyotakan. Akurasi dan kelengkapan data bergantung pada kualitas pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh pihak kelurahan, sehingga terdapat risiko kesalahan pencatatan atau perbedaan interpretasi dalam pengklasifikasian komponen belanja.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian tentang determinan efektivitas anggaran belanja pada Kelurahan Joyotakan Tahun 2021–2025, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan.
2. Tingkat serapan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan.
3. Deviasi realisasi terhadap target anggaran tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan.
4. Proporsi belanja langsung kepada masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan.
5. Pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, terdapat beberapa implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis yang perlu diperhatikan oleh berbagai pemangku kepentingan.

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyerapan anggaran, tingkat serapan anggaran, deviasi realisasi terhadap target anggaran, proporsi belanja langsung kepada masyarakat dan pertumbuhan belanja terhadap efektivitas anggaran belanja Kelurahan Joyotakan.

2. Implikasi Praktis

Bagi Kelurahan Joyotakan yaitu perlunya meningkatkan kualitas penyerapan anggaran secara berkelanjutan, mengingat tingkat serapan

anggaran terbukti sebagai determinan terkuat efektivitas anggaran. Upaya konkret yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki penjadwalan kegiatan, memperketat monitoring pelaksanaan bulanan, dan menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran. Selain itu, Kelurahan Joyotakan perlu untuk membangun sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi guna memungkinkan monitoring efektivitas anggaran secara real-time, dalam konteks reformasi birokrasi. Hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam pengelolaan anggaran.

Bagi Pemerintah Kota Surakarta perlu mendorong peningkatan proporsi belanja langsung kepada masyarakat dalam struktur anggaran kelurahan, karena variabel ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran. Kebijakan yang mendorong belanja pemberdayaan masyarakat, pelatihan, dan bantuan modal usaha di level kelurahan akan meningkatkan efektivitas dan dampak langsung anggaran.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian, berikut disampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait.

1. Bagi Kelurahan Joyotakan, perlu menetapkan target penyerapan anggaran bulanan yang lebih realistis dan terukur, serta melakukan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin setiap bulan untuk mendeteksi dini hambatan penyerapan. Penguatan kapasitas staf pengelola keuangan melalui pelatihan teknis secara berkala juga perlu diprioritaskan.
2. Bagi Pemerintah Kota Surakarta, perlu menyederhanakan prosedur administrasi pencairan dana ke kelurahan agar proses penyerapan anggaran dapat lebih tepat waktu. Pemberlakuan sistem monitoring anggaran kelurahan yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah akan membantu pemantauan efektivitas anggaran secara real-time.
3. Bagi penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk menambahkan variabel moderasi atau mediasi, seperti kualitas sumber daya manusia

pengelola keuangan, sistem pengendalian internal, atau komitmen organisasi, yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap efektivitas anggaran.

4. Bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan objek serupa, disarankan untuk dapat menggunakan data panel dengan cakupan yang lebih panjang dan lebih banyak kelurahan untuk mendapatkan estimasi yang lebih robust, serta dapat menerapkan metode analisis data panel seperti fixed effects atau random effects model untuk mengendalikan heterogenitas antar kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2004). Hubungan Perencanaan Anggaran dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–14.
- Alifah, T. N., Pravasanti, Y. A., & Kusuma, I. L. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Alokasi Anggaran Belanja Modal Di Kabupaten Se-Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(3), 412–419. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i3.65>
- Annisa' Nur Fitriani, & Nur Hayati. (2024). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 4196–4213. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2619>
- Arnida, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i1.1087>
- Arniwita, A., Santoso, A., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2019). Dampak Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Provinsi Jambi). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 166. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.77>
- Asnidar, Putri, A., & Hanum, N. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(2), 166–181.
- Bawimbang, P. M. I., Rorong, I. P., & Siwu, H. F. D. (2021). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Journal EMBA*, 9(2), 523–531. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33548>
- Dilliana, S. M., & Herdi, H. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah* (D. Winarni (ed.); 1st ed.). Eureka Media Aksara.
- Djunaedi, Sudiyarti, & Abidin, A. Z. (2024). *Metode Penelitian Sosial* (A. Asari (ed.)). Mafy Media Literasi Indonesia.
- Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does government expenditure affect regional inclusive growth? An experience of implementing village fund policy in Indonesia. *Economies*, 9(4), 164. <https://doi.org/10.3390/economies9040164>
- Fauzi, A. S. (2022). *Statistika Ekonomi dan Bisnis* (1st ed.). Gerbang Media.
- Fauziyah, I. N., & Ekaningtias, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Belanja, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Legislatif, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Public and Business Accounting*, 3(1), 34–48. <https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.280>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro: Vol. IX* (IX). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.

- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53-64. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53-64.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2020). *Manajemen Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Handayani, T., & Prasetyo, W. (2019). Analisis Deviasi Anggaran dan Dampaknya terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 7(1), 23-34.
- Harimurti, B., & Suranta, A. (2020). Kinerja Penyerapan Anggaran dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Belanja Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 134-142.
- Harlinah, H., Anwar, A. I., & Dewi, A. R. sari. (2025). *Analysis of the Causes of Delays in the Realization of Regional Expenditure Budgets* (Vol. 2024, Issue Icame 2024). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-758-8_213
- Harun, A. (2011). Analisis Struktur dan Pertumbuhan Belanja Daerah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 65-78.
- Hertina, D., Sarjono, H., Hidayat, A. C., Badruddin, S., & Junaidi, W. (2023). *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indriani, Y. (2020). Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Penyerapan Anggaran OPD. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 115-128.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dae*. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kuncoro, H. (2008). Variansi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan| Journal of Theory and Applied Management*, 1(2), 2362. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v1i2.2362>
- Kuntadi, C., & Dian Rosdiana. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142-152. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2.1201>
- Kusuma, R. H., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Pemerintah Kabupaten Gresik. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(2), 1704-1711. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6115>
- Llanas, D., & Llanas, M. D. L. (2024). Fund Allocation and Budget Utilization Rate in Relation to SUC Leveling Performance. *Journal of Innovative Technology Convergence*, 6(3), 1-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.69478/JITC2024v6n3a01>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (4th ed.). Andi Offset.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Maspaitela, A. L., Hendra, J., & Dhany, U. R. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Tingkat Serapan Anggaran Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo. *Jurnal Management, Accounting & Digital Business*, 2(01), 141–150. <https://doi.org/10.51747/jumad.v2i1.1552>
- Muafiq, R. R., & Chariri, A. (2023). Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Penyerapan Anggaran, Belanja Modal, Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Kinerja Pemerintah Daerah sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nini, V., Jonathan, R., & Rahmawati, I. (2019). Analisis Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panglima Sebaya Kabupaten Paser. *Ekonomia*, 8(4), 1–8.
- Nirwana, E., & Trisuswanto, F. (2023). Analisis Efisiensi, Pertumbuhan dan Kesenjangan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. *1*(1), 11–21. <https://journal.iainmutanjungpinang.ac.id/junamu/article/view/54>
- Nugroho, Y. D., & Slamet, K. (2018). Kesenjangan Anggaran pada Belanja Daerah Provinsi. Indonesian Treasury Review. *Indonesian Treasury Review*, 3(3), 170–185. itrev.kemenkeu.go.id
- Nurhayati, N., & Teguh, I. (2025). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik Anggaran, Kinerja, dan Audit Value for Money* (1st ed.). Ganesha Kreasi Semesta.
- Okparizan, & Septian, D. (2017). Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 51–74.
- Oktaviani, Y. O., Etika, C., & Setyanto, A. R. (2021). The Effect of Government Expenditure and Human Capital on the Trend of Economic Growth in Indonesia 2014-2023. *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)*, 4(1), 181–191. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v16i1.3172>
- Patty, J. R. (2019). Budget Forecast Errors and Budget Deviation: Financial Capability Index As Moderating Variable. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 5(2), 157–175. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v5i2.353>
- Rachman, G., Sarma, M., & Rachmina, D. (2020). Strategies for Improvement of Budget Absorption of Bogor City Government. *Journal of Social Science*, 1(5), 195–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jss.v1i5.69>
- Rahayuningsih, D. A., & Syaflan, M. (2024). Upaya Sinkronisasi Rencana Penarikan Dana dengan Realisasi Anggaran Tahun 2022. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 6(4), 522–529. <https://doi.org/10.32493/JEE.v6i4.42533>
- Rahman, A., Sari, N. M. W., Fitriani, Sugiarto, M., Sattar, Abidin, Z., Irwanto, Nugroho, A. P., Indriana, N. L., Haryanto, E., Amane, A. P. O., Ahmadin, & Alaslan, A. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (A. Masruroh (ed.); 1st ed.). Widina Bhakti Persada.

- Rahmawati, E., & Wicaksono, D. (2021). Proporsi Belanja Langsung dan Efektivitas Anggaran Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(3), 109–117.
- Rahmawati, Ibrahim, Irma, Bunyamin, & Dahlan, A. (2024). Budget Planning and Internal Control on Local Financial Accountability: Mediating Budget Absorption. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 72–86. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i1.755>
- Ratnasari, D. (2022). Menilik Penyebab Deviasi antara Rencana dengan Realisasi Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga: Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 91–101. <https://doi.org/10.32639/jiak.v11i2.101>
- RI., B. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020*. Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Safriansah, S., Zukhri, N., & Andriyansah, A. (2021). Analysis of Financial Performance Using Budget Absorption Indicators. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1467–1478. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1775>
- Sandy Sevana, Kinasih, S., Shelyra Leovita Dwi Rahma, & Fauzi, U. (2025). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja DPUPRPKP Kota Malang Periode 2020 – 2023. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance and Economics (NSAFE)*, 5(1), 64–75. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttps://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttps://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Santoso, A., & Murtini, T. (2021). Analisis Pengaruh Waktu Penyerapan Anggaran terhadap Efektivitas Kinerja Anggaran Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–56.
- Santoso, Bogar, W., & Mokat, J. E. H. (2024). Penyerapan Anggaran pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4893–4906. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9163>
- Septian, D. C. (2025). *ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA UNTUK IM*, 1–58.
- Setyorini, D., Arna, Y. D., Wanti, Yulianti, I., Permadi, I., Danes, V. R., Wanget, S. A., Supriyono, Langi, F. L. F. G., Yumni, H., Kusumaningrum, T., Andayani, S. R. D., Handayani, T. L., Widjayanti, Y., Halimatussakdiah, Wati, N. W. K. W., Qomah, I., & Resi, E. M. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (1st ed.). CV. Science Techno Direct.
- Sihombing, D. (2021). SiLPA dan Efektivitas Realisasi Anggaran: Studi di Beberapa Daerah. *Jurnal Keuangan Negara*, 10(1), 43–55.
- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547>

- Simanjuntak, P. A. H., Sinurat, M., & Sidabutar, R. (2022). Analisis Faktor Terjadinya Perbedaan Antara Anggaran Dengan Realisasi Pendapatan Desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 1(1), 36–43.
- Slater, P., & Felicity Hasson. (2025). Quantitative Data Quality Assurance, Analysis and Presentation. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 32(3), 723–727. <https://doi.org/10.1111/jpm.13143>
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., & Purnomo, A. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cetakan 27). Alfabeta.
- Suharyadi, & Purwanto, A. (2020). Peran Kualitas Pelaksanaan Anggaran terhadap Efektivitas Anggaran Belanja. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 145–158.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi publik: Untuk keuangan dan pembangunan daerah*. ANDI.
- Sutono, D. P. S., Respati, N. W., & Safrida, L. (2022). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Satker Pusat Di Daerah Lingkup Kemenlhk. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 135–144. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3656>
- Tarigan, W. J., Sinaga, M. H., & Ginting, R. S. (2023). Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 9–20. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.490>
- Wambrauw, Y., Todingbua, M. A., & Rantererung, C. L. (2025). Efektivitas Dan Efisiensi Belanja Lansung Dan Belanja Tidak Langsung Di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 3(4), 715–723.
- Weni Febriani, Netty Herawaty, & Gandy Wahyu Maulana Zulma. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Jambi. *Jurnal Buana Akuntansi*, 8(1), 57–68. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i1.3340>
- Yusuf, S. D., & Muthi'ah, S. (2019). Problematika Penumpukan Realisasi Anggaran di Akhir Tahun (Studi Kasus di IAIN Sultan Amai Gorontalo). *Jurnal MANAJERIAL*, 19(1), 514–523.
- Zein, M. H. M., Muhtarom, M., Mulyadi, M., & Septiani, S. (2024). Examining the Role of Local Government's Financial Performance and Capital Expenditure in Increasing Economic Growth in Banten Province, Indonesia (2018–2022). *Journal of Risk and Financial Management*, 17(10), 456. <https://doi.org/10.3390/jrfm17100456>
- Zulfaturrohmah, F., Handoko, F. B., & Abiprayu, K. B. (2021). Slow Budget Realization: An Empirical Analysis in Higher Education. *Management Analysis Journal*, 10(4), 450–455. <https://doi.org/10.15294/maj.v10i4.48928>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Populasi Variabel pada Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta periode tahun 2021 – 2025

n	Y	X1	X2	X3	X4	X5
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	87,44	87,44	2,31	12,56	0,00	0,00
3	94,11	102,42	4,48	5,89	0,00	94,08
4	75,16	61,29	8,46	24,84	0,00	88,96
5	55,72	0,00	8,46	44,28	0,00	0,00
6	100,00	220,88	20,75	0,00	16,43	145,20
7	100,00	100,00	22,98	0,00	14,84	10,73
8	100,00	100,00	26,95	-0,00	13,04	17,30
9	100,00	100,00	45,74	0,00	10,95	29,43
10	100,00	100,00	55,10	0,00	10,25	20,47
11	100,00	100,00	64,54	0,00	8,76	17,15
12	87,01	63,36	87,01	12,99	8,44	34,81
13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14	29,26	58,52	2,93	70,74	0,00	0,00
15	40,09	61,74	6,01	59,91	0,00	105,51
16	70,33	166,04	13,88	29,67	0,00	130,88
17	60,46	40,75	17,91	39,54	0,00	29,00
18	61,56	64,84	24,31	38,44	0,00	35,74
19	62,11	64,29	30,66	37,89	0,14	26,10
20	64,94	78,93	38,55	35,06	0,11	25,75
21	77,06	155,88	52,78	22,94	0,08	36,92
22	86,57	159,57	67,58	13,43	6,41	26,96
23	85,00	72,10	74,45	15,00	5,82	10,17
24	90,90	132,56	90,90	9,10	6,39	22,10
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
26	29,75	102,63	2,73	-2,63	0,00	0,00
27	38,46	121,10	7,46	-13,62	0,00	173,17
28	48,87	161,20	13,65	-31,17	0,00	82,94
29	63,09	146,55	21,03	-34,96	0,00	36,45
30	70,38	28,82	29,11	33,26	3,44	38,42
31	57,26	32,97	36,65	44,88	7,05	25,91
32	65,58	189,49	45,66	35,91	7,29	24,59
33	77,40	223,69	59,92	22,80	5,78	31,23
34	88,63	-1.689,83	77,35	-1,52	4,45	29,72
35	91,09	107,50	85,54	-2,07	4,03	10,58
36	96,44	67,30	96,44	3,56	3,57	12,74
37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
38	38,39	83,98	4,81	61,61	0,00	0,00
39	37,33	34,83	6,64	62,67	0,00	38,09
40	54,22	84,13	15,09	45,78	0,00	127,27

n	Y	X1	X2	X3	X4	X5
41	63,66	109,68	21,35	36,34	0,00	41,48
42	61,31	49,69	24,73	38,69	0,00	15,80
43	60,06	55,43	30,75	39,94	0,00	24,38
44	61,28	69,61	35,99	38,72	0,00	17,02
45	67,45	99,34	47,27	32,55	0,00	31,34
46	73,87	105,08	62,41	26,13	5,83	32,03
47	81,12	180,00	73,57	18,88	4,95	17,88
48	93,58	214,88	93,58	6,42	3,89	27,20
49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
50	64,52	161,26	5,53	35,48	0,00	0,00
51	106,04	155,25	16,76	-6,04	0,00	203,03
52	89,87	29,14	17,98	10,13	0,00	7,32
53	84,26	66,59	22,21	15,74	0,00	23,51
54	65,20	34,04	27,70	34,80	0,00	24,71
55	65,84	69,18	33,26	34,16	0,00	20,07
56	72,60	146,00	38,02	27,40	0,00	20,43
57	57,02	13,53	40,56	42,98	0,00	6,67
58	87,80	459,48	67,62	12,20	0,00	66,71
59	90,28	104,64	81,60	9,72	8,66	20,67
60	94,72	136,34	94,72	5,28	7,46	16,08

Lampiran 2. Hasil Analisis Deskriptif

a. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	60	,00	106,04	67,0848	27,98670
X1	60	-1689,83	459,48	67,4022	242,46433
X2	60	,00	96,44	35,0738	29,39988
X3	60	-34,96	100,00	24,2717	27,88756
X4	60	,00	16,43	2,8010	4,27724
X5	60	-100,00	203,03	29,2450	55,11670
Valid N (listwise)	60				

b. Rerata Setiap Variabel Per Tahun (dalam persen)

Tahun	Ef. Anggaran (Y)	Ketepatan Waktu (X ₁)	Serapan (X ₂)	Deviasi (X ₃)	Belanja Langsung (X ₄)	Pertumbuhan (X ₅)
2021	83,29	86,28	28,90	8,38	6,89	38,18
2022	60,69	87,94	35,00	39,31	1,58	29,09
2023	60,58	- 42,38	39,63	4,54	2,97	30,48
2024	57,69	90,55	34,68	42,31	1,22	22,71
2025	73,18	114,62	37,16	26,82	1,34	25,77
Mean	67,09	67,40	35,07	24,27	2,80	29,25

Lampiran 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,098	60	,200 [*]	,959	60	,043

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

b. Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	47,188	5,396		8,745	,000		
	X1	,003	,009	,023	,298	,767	,975	1,026
	X2	,410	,087	,431	4,718	,000	,718	1,393
	X3	-,188	,095	-,187	-1,972	,054	,662	1,511
	X4	1,700	,593	,260	2,867	,006	,728	1,374
	X5	,176	,044	,346	3,960	,000	,783	1,277

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics ^a									
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	X1	X2	X3	X4	X5
1	1	2,938	1,000	,02	,02	,03	,01	,03	,02
	2	1,041	1,680	,01	,01	,00	,21	,04	,17
	3	,951	1,758	,00	,70	,03	,01	,06	,03
	4	,684	2,073	,01	,25	,01	,02	,18	,43
	5	,283	3,221	,01	,02	,50	,12	,68	,07
	6	,102	5,362	,97	,00	,44	,63	,01	,29

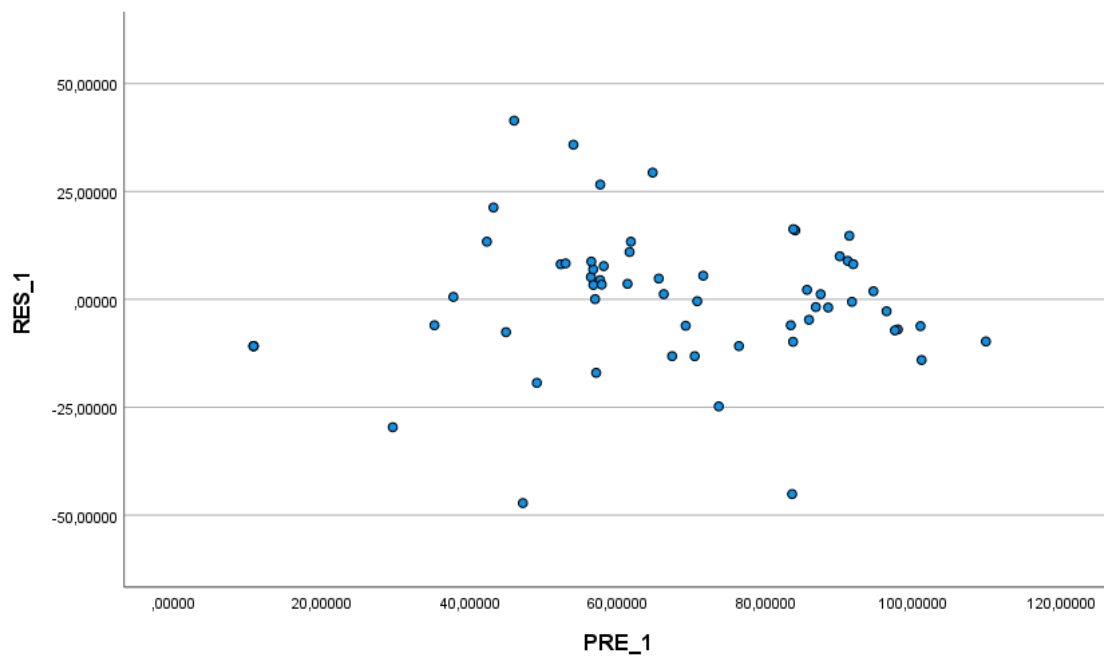
a. Dependent Variable: Y

c. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	20,802	16,297		1,276	,224
	X1	-,077	,049	-,436	-1,584	,137
	X2	,008	,136	,019	,062	,951
	X3	,053	,320	,058	,167	,870
	X4	-,066	1,101	-,016	-,060	,953
	X5	-,078	,360	-,069	-,216	,832

a. Dependent Variable: ABS_RES_1

d. Grafik Scatterplot Heteroskedastitas



e. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,987 ^a	,973	,963	2,44787	2,488

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

a. Model Regresi

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.		
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	47,188	5,396		8,745	,000		
	Ketepatan_Waktu	,003	,009	,023	,298	,767	,975	1,026
	Tingkat_Serapan	,410	,087	,431	4,718	,000	,718	1,393
	Deviasi_Realisasi	-,188	,095	-,187	-1,972	,054	,662	1,511
	Proporsi_Belanja_Langsung	1,700	,593	,260	2,867	,006	,728	1,374
	Pertumbuhan_Belanja	,176	,044	,346	3,960	,000	,783	1,277

a. Dependent Variable: Efektivitas_Anggaran

b. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31292,969	5	6258,594	22,653	,000^b
	Residual	14919,092	54	276,279		
	Total	46212,061	59			

a. Dependent Variable: Efektivitas_Anggaran

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan_Belanja, Tingkat_Serapan, Ketepatan_Waktu, Proporsi_Belanja_Langsung, Deviasi_Realisasi

c. Hasil Uji Hipotesis (Uji t Parsial)

		Coefficients ^a					95,0% Confidence Interval for B	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.		
Model		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	47,188	5,396		8,745	,000	36,369	58,006
	Ketepatan_Waktu	,003	,009	,023	,298	,767	-,015	,021
	Tingkat_Serapan	,410	,087	,431	4,718	,000	,236	,584
	Deviasi_Realisasi	-,188	,095	-,187	-1,972	,054	-,379	,003
	Proporsi_Belanja_Langsung	1,700	,593	,260	2,867	,006	,511	2,889
	Pertumbuhan_Belanja	,176	,044	,346	3,960	,000	,087	,265

a. Dependent Variable: Efektivitas_Anggaran

d. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,823 ^a	,677	,647	16,62166

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan_Belanja, Tingkat_Serapan, Ketepatan_Waktu, Proporsi_Belanja_Langsung, Deviasi_Realisasi

e. Estimasi Kontribusi Parsial Variabel Independen terhadap R^2

Coefficients ^a									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	47,188	5,396		8,745	,000			
	Ketepatan_Waktu	,003	,009	,023	,298	,767	,051	,041	,023
	Tingkat_Serapan	,410	,087	,431	4,718	,000	,624	,540	,365
	Deviasi_Realisasi	-,188	,095	-,187	-1,972	,054	-,580	-,259	-,152
	Proporsi_Belanja_Langsung	1,700	,593	,260	2,867	,006	,552	,363	,222
	Pertumbuhan_Belanja	,176	,044	,346	3,960	,000	,448	,474	,306

a. Dependent Variable: Efektivitas_Anggaran